

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

Rakyat Merdeka

PENGAMANAN BANTEN DIPERKETAT

BANTEN, BANPOS - Sejumlah titik di Provinsi Banten mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Aktivitas dan lalu lintas warga diawasi terkait dengan aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (27/8) kemarin. Sementara sejumlah Polres di bawah jajaran Polda Banten juga menggelar doa Bersama dengan komunitas ojek online di wilayahnya masing-masing.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten menerjunkan sekitar 200 personel gabungan untuk melakukan patroli dan penyekatan pergerakan terhadap massa yang akan me-

nuju Jakarta melalui gerbang tol hingga stasiun kereta untuk menggelar aksi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Tangerang Kumpul Raden Mochammad Sofian di Tangerang, mengatakan langkah preventif itu difokuskan pada titik-titik rawan, mulai dari jalur perbatasan hingga kawasan stasiun kereta api.

"Kami mempersiapkan untuk mengantisipasi adanya masa yang akan ke Jakarta, khusus wilayah Tangerang. Tentunya kita mengantisipasi adanya para BACA PENGAMANAN HAL - 9

RUU Perampasan Aset Ditarget Desember

JAKARTA, BANPOS - DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan disahkan paling lambat 15 Desember

2026. Selama prosesnya DPR berkomitmen untuk membuka ruang aspirasi bagi publik untuk memberi saran bagi penyusunan RUU tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal pun menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

(AMPB) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8) untuk me- BACA RUU PERAMPASAN HAL - 9

Vox Populi



Edwin Mahesa Pardede
WARTAWAN BANTEN POS

Fakta yang Bias

SEMLIWIR angin di hari itu tiba-tiba menjadi semu. Bukan karena angin itu berasal dari kilas angin namun karena adanya pengkondisian suatu persoalan yang membuat jiwa dan raga serasa hampa. Kita hidup di pusaran era di mana kebenaran sering kali dibengkokkan dengan begitu rapi. Fakta tak lagi berdiri tegak secara absolut, melainkan meliuk lentur mengikuti arah telunjuk siapa yang menyuarakannya.

Di trotoar jalanan yang bising, di BACA VOX POPULI HAL - 9



DZIKI OKTOMALIYADI/BANTEN POS

PEMBUKAAN DANANTARA HOUSING EXPO 2026

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait melihat miniatur setplan perumahan saat pembukaan Danantara housing expo 2026 di PIK 2, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8). Danantara Housing Expo 2026 menghadirkan lebih dari 360 ribu unit properti yang ditawarkan oleh lebih dari 130 developer BUMN dan swasta. Dari ekosistem BUMN, sebanyak 12 developer menghadirkan lebih dari 16 ribu unit dari 98 proyek yang tersebar di 23 provinsi dengan total nilai inventori mencapai Rp9,79 triliun.

Bertaruh Nyawa di Getek:

Cerita Warga Seberangi Ciberang

Oleh: Taufiq Solehudin

SIANG itu cuaca di Sajira terasa terik menyengat. Terlebih, sang mentari berada tepat di atas ubun-ubun membuat

siapapun yang terpapar sinarnya kepayahan. Jika terlalu lama berada di luar tanpa pelindung, kulit akan tampak merah terbakar.

BACA CERITA HAL - 9

EDWIN MAHESA PARDEDE/BANTEN POS



Warga Kampung Sombang andalkan aliran Sungai Ciberang sebagai satu-satunya akses menuju jalan raya tercepat. Menggunakan getek, mereka tampak antusias melintasi aliran sungai tersebut

95 PERSEN DIREKSI BUMD DIISI WAJAH BARU

SERANG, BANPOS - Wakil Gubernur Banten, A Dimiyati Natakusumah memastikan akan adanya perombakan besar-besaran yang diproyeksikan akan mendominasi struktur baru kepengurusan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten. Dimiyati menegaskan bahwa sekitar 95 persen direksi baru akan diisi dengan wajah-wajah baru dengan kompetensi yang lebih baik dan mumpuni dalam memaksimalkan peran penting BUMD Banten.

Dimiyati menuturkan jika pemerintah kini tengah menyiapkan langkah strategis untuk mere- BACA 95 PERSEN HAL - 9

PEMKAB EVALUASI PENGELOLAAN ARSIP OPD

03

PERMAHI DESAK KEJAKSAAN BONGKAR DUGAAN KORUPSI ANGGARAN DINKES

04

ANCAMAN BONUS DEMOGRAFI

08

ORMAS HARUS HADIRKAN SOLUSI DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

12

ACHMAD CHATIB DIBIDIK JADI PAHLAWAN NASIONAL

SERANG, BANPOS - Pemkot Serang optimistis usulan Almarhum Kiai Haji Tubagus Achmad Chatib sebagai Pahlawan Nasional tahun BACA ACHMAD HAL - 9

TERVERIFIKASI
DEWAN PERS



BANPOS CHANNEL

WWW.BANPOS.CO

BANTENPOS@GMAIL.COM

BANTEN_POS

BANTEN POS

HARGA ECERAN
RP 4.000

PANDEGLANG, BANPOS - Peme-rintah Kabupaten (Pemkab) Pan-deglang mendukung langkah Pol-res Pandeglang memperkuat si-nergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertib-an masyarakat (kamtibmas). Dukung-an tersebut disampaikan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani usai menghadiri Apel Besar Sabuk Kamtibmas dan Pam Swakarsa di Lapangan Mapolres Pandeglang, Kamis (27/8).

Menurut Dewi, kondisi keaman-an yang kondusif merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Situasi yang aman akan membe-rikan rasa nyaman bagi masyara-kat sekaligus menunjang aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan. “Pemkab Pan-deglang sangat mendukung kegiat-an yang dilaksanakan Polres Pan-deglang. Sinergi antara pemerintah daerah, Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ke-tertiban di Kabupaten Pande-glang,” kata Dewi.

Ia mengapresiasi keterlibatan

PANDEGLANG, BANPOS - Le-dakan yang diduga berasal dari bom ikan terjadi di Kampung Cisa-rua, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pande-glang, Rabu (26/8) sekitar pukul 13.30 WIB. Peristiwa tersebut me-newaskan seorang nelayan berinisial MA (48) dan menyebabkan istrinya, IY (43), mengalami luka berat. Dua rumah di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami keru-sakan akibat ledakan tersebut.

Polda Banten langsung mener-junkan Tim Gegana Satbrimob dan Tim INAFIS Ditreskrimum Polda

OLEH:
Djoko Subinarto
Kolumnis, Alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

HUBUNGAN Indonesia dan China memasuki babak baru. Pertemuan pertama *Compre-hensive Strategic Dialogue* (CSD) antara kedua negara, yang dilangsungkan di Jakarta, 21 Agustus 2026, bukan sekadar seremonial diplomatik semata. Di dalam acara itu terdapat rancangan agenda kerja sama lima tahun untuk periode 2027–2031, mencakup perdagangan, energi, mineral, maritim, kecerdasan buatan, teknologi mutakhir, pangan, kesehatan, pendidikan, hingga keamanan. Dengan demikian, hubungan kedua negara sedang bergerak dari kerja sama sektoral menuju arsitektur hubungan yang semakin menyeluruh.

Bagi Indonesia, China adalah mitra ekonomi yang terlalu penting untuk diabaikan. Adapun bagi China, Indonesia adalah negara yang terlalu besar untuk sekadar menjadi pasar atau pemasok bahan mentah.

Karena itu, pertanyaan terpenting untuk lima tahun ke depan bukan apakah Indonesia perlu bekerja sama dengan China. Jawabannya hampir pasti iya. Pertanyaannya adalah: Kerja sama seperti apa yang membuat Indonesia menjadi lebih kuat setelah kerja sama itu berlangsung?

Data perdagangan memper-lihatkan besarnya hubungan ekonomi Indonesia-China, sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur perdagangan kedua negara.

Pada Januari-November 2025, China menjadi pasar ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai mencapai 58,24

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA

Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA

Karim Paputungan

KOMISARIS

Maria Hanief

DIREKTUR

Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA

Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan

Blok D, No.3, Kota Serang, Banten

Telephon/Fax: (0254) 407 8285

No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001

BCA -2454 061 704

(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:

WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga |

JAWAB: Chandra Magga | REDAKTUR PELAKSANA: Azmart Tusnedi | REDAKTUR: Ghuroofie Dzhilliluh, Stefano, Dedi Rustandi |

REPORTER: CH Widodo Haider, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Paradede | PENGEMBANGAN BISNIS: Sobar Rohmat | IKLAN: Zulfa Nadira (Manager), Dody Fitriadi | FOTOGRAFER: Dziki Oktomaulyadi | PRA CETAK & PERWAJAHAN: Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadij | GRAFIS: Ahmad Bukhori | ACCOUNTING: Ifroh Hardianti | ADMINISTRASI KEUANGAN: Azi Abdurohman | ADMINISTRASI PAJAK: Nadia Al Vani | ADMINISTRASI: Nia Aryanti | PEMASARAN: Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :

Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2

Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :

Gedung Graha Pena, Lantai 5

Jalan Kebayoran Lama No.12,

Jakarta Selatan

Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :

PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

POLITIK & HUKUM

Pemkab Pandeglang Dukung Penguatan Sabuk Kamtibmas



Bupati Pandeglang, Dewi Setiani saat mengikuti upacara apel besar.

Bhabinkamtibmas, Sabuk Kamtib-mas, Pam Swakarsa dan masyara-kat dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Dewi

berharap sinergitas tersebut terus diperkuat, terutama untuk meng-hadapi berbagai dinamika dan po-tensi gangguan keamanan yang

berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan unsur keamanan hingga tingkat desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam mendeteksi persoalan sejak dini. “Komunikasi yang baik de-ngan masyarakat diharapkan da-pat mencegah munculnya konflik dan gangguan keamanan yang lebih besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Pande-glang AKBP Dhyno Indra Setyadi mengatakan, Polres Pandeglang terus memperkuat soliditas dan si-nergitas dengan seluruh kompon-en keamanan untuk menjaga wilayah hukumnya tetap aman dan kondusif. Ia menegaskan, menjaga kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri. Peran ma-syarakat melalui Sabuk Kamtib-mas, Bhabinkamtibmas dan Pam

Swakarsa juga dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. “Sabuk Kam-tibmas memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan di lingkungan masya-rakat. Oleh karena itu, saya ber-harap seluruh anggota Sabuk Kamtibmas dapat menjadi pelopor dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, damai, serta mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan aparat keamanan,” tegasnya.

Dhyno mengatakan, berbagai dinamika kamtibmas tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri. Diperlukan komunikasi, kepedu-lian dan koordinasi antara aparat keamanan dengan masyarakat. Ia juga meminta setiap potensi gang-guan dapat dideteksi dan dicegah

sedini mungkin melalui pende-katan humanis dengan tetap me-ngedepankan kepentingan ma-syarakat.

Selain itu, anggota Sabuk Kamtibmas diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diimbau segera berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas atau kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan. “Ja-ngan menyebarkan berita yang be-lum terverifikasi. Sampaikan infor-masi yang benar dan segera berko-ordinasi dengan Bhabinkamtib-mas atau kepolisian apabila me-nemukan adanya potensi gang-guan keamanan,” terangnya.

Melalui apel besar tersebut, Pol-res Pandeglang berharap sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah dae-rah, Sabuk Kamtibmas, Bhabin-kamtibmas, Pam Swakarsa dan masyarakat semakin kuat. Kolabo-rasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Pan-deglang.(DHE/PAY)

Ledakan Diduga Bom Ikan Tewaskan Nelayan di Panimbang

Banten untuk mengamankan lo-kasi, melakukan sterilisasi, serta olah tempat kejadian perkara (TKP). Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, Tim Gegana terlebih dahulu melakukan sterilisasi untuk memastikan lokasi aman sebelum proses olah TKP dilakukan.

“Tim Gegana Satbrimob Polda

Banten masih melakukan steri-lisasi untuk selanjutnya dilakukan olah TKP oleh Tim INAFIS Di-treskrimum Polda Banten, guna mengumpulkan barang bukti,” ujar Maruli, Rabu (26/8).

Ia mengatakan, berdasarkan informasi sementara, ledakan ter-jadi di rumah milik MA yang meru-pakan nelayan dan tinggal bersa-

ma istrinya di Desa Citeureup, Ke-camatan Panimbang.

“Dalam kejadian ini, MA me-ninggal dunia, sementara IY me-ngalami luka berat dan saat ini di-rawat di RS Panimbang Pande-glang,” terangnya.

Maruli turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya MA. Ia berharap keluarga korban dibe-

rikan kekuatan dan ketabahan da-lam menghadapi peristiwa terse-but. “Kami turut berduka cita atas meninggalnya saudara MA dalam peristiwa dugaan ledakan bom ikan di Panimbang. Semoga ke-luarga yang ditinggalkan dibe-rikan kekuatan dan ketabahan,” katanya.

Polda Banten mengimbau ma-

syarakat, khususnya nelayan, tidak meracik maupun menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Selain melanggar hukum, penggunaan bahan peledak dapat membahayakan keselamatan dan merusak lingkungan.

“Selain dapat merusak lingku-ngan, penggunaan bahan peledak juga dapat membahayakan kese-lamatan. Ingat, satu tindakan yang tidak tepat dapat membahayakan diri sendiri, keluarga maupun orang lain di sekitar. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya.(DHE/PAY)

RUANG PUBLIK

Indonesia-China 2027-2031: Jangan Cuma Mengejar Investasi

miliar dolar AS, atau sekitar 23,80 persen dari total ekspor nonmigas. Pada saat yang sama, China juga menjadi negara asal impor nonmigas terbesar bagi Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada periode Januari-Oktober 2025 saja, impor nonmigas dari China telah mencapai 70,19 miliar dolar AS, atau 40,90 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Besarnya angka perdagangan tersebut menunjukkan bahwa China merupakan mitra ekonomi yang sangat penting bagi Indo-nesia. Namun, angka perdagang-an tidak cukup dilihat hanya dari besar-kecilnya nilai ekspor dan impor.

Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut, yaitu apakah hubungan perdagangan itu membuat kemampuan produksi Indonesia semakin kuat?

Impor dari China, misalnya, tidak dengan sendirinya menunjukkan posisi yang buruk. Negara yang sedang melakukan industrialisasi memang membutuhkan mesin, peralatan, bahan baku, komponen, dan barang modal dari negara yang memiliki basis industri lebih maju.

Bahkan, impor barang modal dapat menjadi investasi bagi peningkatan produktivitas apabila kemudian mampu memperkuat kapasitas produksi di dalam negeri. Impor barang modal dapat menjadi investasi bagi produktivitas masa depan.

Persoalan muncul apabila keberuntungan pada impor tersebut tidak menghasilkan kemampuan produksi domestik yang semakin kuat.

Rencana aksi

Indonesia jangan sampai hanya

menjadi tempat masuknya ba-rang modal, tetapi gagal mengembangkan pengetahuan yang membuat barang modal itu kelak dapat diproduksi, dimo-difikasi, atau dikembangkan sendiri.

Maka dari itu, Rencana Aksi 2027–2031 menjadi krusial. Lima tahun itu seharusnya tidak dipandang sebagai daftar proyek, melainkan sebagai kesempatan menyusun peta jalan peningkatan kapasitas Indonesia.

Ambil contoh, misalnya, dalam bidang mineral. Badan Energi Internasional mencatat Indonesia menjadi berapa banyak pemasok Indonesia yang naik kelas, berapa banyak insinyur Indonesia yang menguasai teknologi, berapa banyak paten dan penelitian bersama yang dihasilkan, berapa banyak komponen lokal yang masuk rantai produksi, dan berapa banyak perusahaan Indonesia yang akhirnya mampu menembus pasar global.

Pemerintah sebenarnya memiliki modal untuk mendorong arah tersebut. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, sementara investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total realisasi dan tumbuh 43,3 persen secara tahunan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa investasi di Indonesia semakin terkait dengan agenda pengolahan sumber daya. Namun, peningkatan nilai investasi tidak dengan sendirinya berarti peningkatan kapasitas nasional.

pembiayaan, hingga kemampuan menghasilkan produk akhir.

Jika Indonesia hanya menguasai tahap ekstraksi dan sebagian pemrosesan sementara teknologi inti, mesin, komponen, dan pasar tetap dikuasai pihak lain, nilai tambah memang meningkat, tetapi kemampuan strategis belum tentu ikut meningkat.

Karena itu, kerja sama dengan perusahaan China sebaiknya tidak hanya diukur dari berapa banyak investasi yang masuk. Ukurannya perlu diperluas menjadi berapa banyak pemasok Indonesia yang naik kelas, berapa banyak insinyur Indonesia yang menguasai teknologi, berapa banyak paten dan penelitian bersama yang dihasilkan, berapa banyak komponen lokal yang masuk rantai produksi, dan berapa banyak perusahaan Indonesia yang akhirnya mampu menembus pasar global.

Pemerintah sebenarnya memiliki modal untuk mendorong arah tersebut. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, sementara investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total realisasi dan tumbuh 43,3 persen secara tahunan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa investasi di Indonesia semakin terkait dengan agenda pengolahan sumber daya. Namun, peningkatan nilai investasi tidak dengan sendirinya berarti peningkatan kapasitas nasional.

Tantangan

Tantangan Indonesia ke depan bukan hanya bagaimana mendatangkan lebih banyak investasi, melainkan bagaimana memastikan investasi tersebut

membawa teknologi, pengetahuan, dan kemampuan baru ke dalam perekonomian.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting ketika persaingan global mulai bergeser dari sekadar perebutan modal dan sumber daya menuju persaingan teknologi. Karena itu, masuknya akal imitasi (AI) dalam agenda CSD Indonesia-China memiliki arti strategis.

AI bukan sekadar teknologi untuk menjalankan *chatbot* atau mengotomatisasi pekerjaan administratif. Di belakangnya terdapat kebutuhan modal dan sumber daya menuju persaingan teknologi. Karena itu, masuknya akal imitasi (AI) dalam agenda CSD Indonesia-China memiliki arti strategis.

Karena itu, kerja sama AI Indonesia-China sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas investasi dan kapasitas industri nasional. Investasi yang masuk tidak cukup hanya menghasilkan pabrik dan lapangan kerja. Ia juga harus memperkuat kemampuan Indonesia untuk memahami, mengembangkan, dan menciptakan teknologi.

Negara yang hanya membeli teknologi akan terus menjadi pengguna. Sebaliknya, negara yang mampu membangun kapasitas teknologi akan memiliki pilihan yang lebih banyak dan daya tawar yang lebih kuat.

Di sinilah kerja sama AI dalam CSD Indonesia-China seharusnya diarahkan bukan hanya memba-wa teknologi ke Indonesia, tetapi juga membuat semakin banyak kemampuan teknologi tumbuh di Indonesia.

Aset yang dikejar

Dalam ekonomi modern, keunggulan tidak hanya berada pada benda yang diproduksi,

tetapi pada kemampuan mema-hami bagaimana benda itu dibuat. Mesin dapat dibeli. Pabrik dapat dibangun. Perangkat lunak dapat dilisensikan.

Namun, kemampuan manusia untuk merancang, memperbaiki, mengembangkan, dan mencipta-kan teknologi baru membutuh-kan waktu bertahun-tahun. Itulah aset yang seharusnya dikejar Indonesia dalam lima tahun mendatang.

Persoalan yang sama berlaku untuk energi. Indonesia membutuhkan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas energi sekaligus menjalankan transisi menuju sumber energi yang lebih bersih. China memiliki kapasitas industri yang sangat besar dalam panel surya, baterai, kendaraan listrik, dan berbagai teknologi energi. Kerja sama jelas memberikan keuntungan.

Tetapi, Indonesia perlu memastikan bahwa transisi energi tidak menciptakan ketergantungan teknologi baru setelah ketergantungan pada bahan bakar fosil berkurang.

Dalam konteks ini, istilah kemitraan perlu memiliki isi yang konkret. Kemitraan bukan berarti kedua pihak memperoleh sesuatu dalam jumlah yang sama.

Kemitraan berarti kepentingan kedua pihak bertemu dengan aturan yang memungkinkan masing-masing meningkatkan kapasitasnya.

Indonesia memiliki sumber daya, pasar, lokasi strategis, tenaga kerja, dan kebutuhan pembangunan. China memiliki modal, teknologi, kapasitas industri, serta akses pada jaringan produksi global.

Perbedaan itulah yang seharusnya menjadi dasar negosiasi, bukan alasan bagi salah satu pihak menjadi lebih dominan.*

Permahi Desak Kejaksanaan Bongkar Dugaan Korupsi Anggaran Dinkes

Uang Rakyat Wajib Dipertanggungjawabkan

LEBAK, BANPOS - Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Puskesmas pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak tahun 2025 terus bergulir.

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC Permahi) Banten mendesak Kejaksanaan Negeri (Kejari) Lebak tidak hanya memeriksa saksi, tetapi fokus membongkar aliran sisa anggaran sebesar Rp194 juta yang hingga kini tak jelas rimbanya.

Ketua DPC Permahi Banten, M. Nurul Hakim, menyatakan proses klarifikasi terhadap sejumlah bendahara Puskesmas hingga Sekretaris Dinkes Lebak yang dilakukan korps Adhyaksa harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta hukum secara transparan.

“Pemeriksaan terhadap para pihak tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, ada persoalan serius yang perlu perhatian, yakni informasi mengenai sisa anggaran sekitar Rp194 juta yang belum dike-

etahui secara jelas keberadaan dan pertanggungjawabannya,” tegas Nurul Hakim dalam keterangan persnya, Kamis (27/8).

Menurutnya, dalam perspektif hukum perbendaharaan negara, setiap penggunaan uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara nyata. Ia menekankan bahwa jika benar terdapat sisa dana sebesar Rp194 juta, Kejari Lebak harus mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai sumber anggaran, siapa yang mengelola, hingga apakah dana tersebut sudah disetorkan kembali ke kas daerah atau justru menguap.

“Pertanyaan hukumnya bukan sekadar uang itu ada atau tidak, tetapi siapa yang menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sisa dana tersebut? Apakah ada bukti transaksi, kuitansi, atau SPJ yang dapat menjelaskan penggunaan dana tersebut?” cetusnya.

Dia mengingatkan Kejari Lebak agar tidak terjebak pada pemeriksaan formalitas semata. Ia mendorong penyidik untuk melakukan audit trail atau penelusuran rekam

jejak arus uang secara menyeluruh.

“Jangan hanya periksa orang, periksa aliran uang. Kejaksanaan tidak cukup hanya memeriksa siapa yang mengetahui kegiatan tersebut, tetapi perlu melakukan audit terhadap keseluruhan penggunaan anggaran, mulai dari pencairan, rekening penerima, hingga posisi akhir dana,” paparnya.

DPC PERMAHI Banten menilai, jika ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai peraturan, pertanggungjawaban fiktif, atau penguasaan dana untuk kepentingan pribadi, hal tersebut sudah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Pihaknya pun menyodorkan sejumlah rekomendasi kepada Kejari Lebak, di antaranya melakukan pencocokan antara dokumen anggaran dengan realisasi kegiatan di lapangan. Jika diperlukan, Kejari harus berani berkoordinasi dengan BPKP atau BPK untuk memastikan adanya kerugian negara yang nyata (actual loss).

“Uang publik harus memiliki jejak

pertanggungjawaban yang jelas. Jika Rp194 juta itu sisa anggaran, harus terang di mana uangnya dan siapa yang menguasainya. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada siapa yang diperiksa, sementara ke mana aliran uangnya justru tidak terjawab,” tegasnya.

Nurul Hakim menambahkan, PERMAHI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas guna memastikan setiap rupiah uang negara di Kabupaten Lebak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara profesional tanpa pandang bulu.

“Transparansi anggaran bukan pilihan. Pertanggungjawaban uang negara adalah kewajiban,” tandasnya.

Senada dengan PERMAHI, desakan untuk mengusut tuntas perkara ini juga datang dari Ketua Badak Banten Perjuangan (BBP) Kabupaten Lebak, Eli Sahroni. Ia menegaskan, Kejari Lebak harus menyeret seluruh pihak yang memiliki kaitan dengan agenda Bimtek BLUD Puskesmas yang digelar di Bandung tersebut.

Eli meminta Seksi Pidana Khusus

(Pidsus) Kejari Lebak tidak hanya terpaku pada sepuluh orang yang telah dipanggil sebelumnya. Baginya, pemanggilan harus dilakukan secara komprehensif, termasuk kepada pihak TISIP selaku penyelenggara kegiatan.

“Harus dituntaskan pemeriksaan terhadap para pihak yang berkaitan dengan kegiatan Bimtek BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan di Bandung tahun 2025 lalu. Pemanggilan harus dilakukan kepada seluruh pihak termasuk TISIP selaku penyelenggara untuk diminta keterangan secara komprehensif untuk mengungkap adanya dugaan korupsi,” tegas Eli.

Lebih jauh, Eli mengungkap informasi krusial mengenai dugaan raibnya sisa anggaran dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut, terdapat kabar mengenai sisa uang sebesar Rp194 juta yang diduga telah berpindah tangan ke oknum pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

Informasi ini, menurut Eli, harus menjadi fokus utama bagi tim penyidik Pidsus untuk membuktikan kebenarannya melalui pemeriksaan yang lebih mendalam.

“Pidsus Kejari Lebak tak harus berhenti di 10 orang yang dipanggil dan diperiksa. Untuk mengungkap kasus, selama ada yang patut dimintai keterangan, harus dipanggil dan diperiksa. Kami mendapat kabar bahwa dari kegiatan Bimtek itu ada sisa anggaran sebesar Rp194 juta digondol oleh oknum pejabat Dinkes dari panitia,” bebernya.

Ia mendesak pihak kejaksanaan untuk tidak membiarkan informasi mengenai sisa anggaran tersebut menguap begitu saja. Ia menitipkan tugas besar ini kepada penyidik untuk memastikan apakah uang negara tersebut benar-benar dilapalkan atau tidak.

“Pihak Pidsus Kejari Lebak harus bisa melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi untuk memastikan adanya sisa anggaran yang digondol tersebut. Sisa anggaran Rp194 juta yang diduga digondol pejabat Dinkes itu harus dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi untuk memastikan benar atau tidaknya, itu tugas penyidik Pidsus,” pungkasnya.(TQS/RUS)

MULTATULI

Terdakwa Kasus Penggelapan Mobil Rental Divonis 2,6 Tahun

EKO Adhitya, terdakwa kasus penggelapan kendaraan sewa divonis penjara selama 2,6 tahun. Vonis ini dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap sejumlah fakta persidangan yang disampaikan, terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tersebut.

Akibatnya, terdakwa Eko Adhitya dijatuhi vonis berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh majelis hakim.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ujar majelis hakim dalam persidangan tersebut.

Selain itu dalam persidangan tersebut majelis hakim juga memerintah agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kemudian majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap ditahan,” katanya.

Vonis yang diberikan majelis hakim dalam persidangan tersebut sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan sebelumnya.

Dimana dalam persidangan tersebut, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2,6 tahun. Hal itu dikarenakan perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut diaggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 492 KUHP Pidana.

“Menyatakan terdakwa Eko Adhitya bin Asep Kusnanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan,” ucap JPU Kejaksaan Negeri Lebak, Riski Haruna Maya.(TQS/RUS)

Vonis Penambang Batu Bara Ilegal TNGHS

1,8 Tahun Penjara dan Denda Rp20 Juta

LEBAK, BANPOS - Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung menjatuhkan vonis kepada Suryana, terdakwa perkara penambangan batu bara ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Akibat perbuatannya, dia dipidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.

Dalam persidangan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Suryana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan aktivitas pertambangan batu bara secara ilegal sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 dan Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Penilaian tersebut selaras dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan sebelumnya.

“Menyatakan terdakwa Suryana alias Anung bin Suhandha tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam hutan tanpa izin menteri, sebagaimana dakwaan alternatif ke satu,” ujar majelis hakim dalam persidangan tersebut.

Kemudian karena dinyatakan terbukti bersalah maka, terdakwa dijatuhi vonis berupa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, serta pidana denda sebesar Rp20 juta yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan.

Namun, jika pidana denda tersebut tidak ditunaikan maka konsekuensinya harta kekayaan terdakwa akan dilelang guna melunasi vonis hukuman tersebut. Kemudian apabila hasil lelang kekayaan tersebut belum mencukupi, maka sebagai gantinya diberlakukan masa tahanan selama 20 hari.

“Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak mencukupi atau tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 20 hari,” katanya.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri Lebak menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Minerba. Oleh karenanya terdakwa dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Minerba Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai-

mana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

Kemudian karena dianggap terbukti bersalah, Jaksa mengajukan tuntutan berupa pidana penjara selama dua tahun. Selain pidana penjara, Jaksa juga mengajukan tuntutan kepada majelis hakim berupa pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp20 juta.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suryana alias Anung bin (Alm) Suhandha dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp20 juta yang wajib dibayar dalam jangka waktu satu bulan,” pungkasnya.(TQS/RUS)



Kapolres Arninsi memberikan santunan anak yatim pada acara gelar Maulid Nabi SAW di Polres Lebak.

Tanamkan Nilai Teladan Nabi Muhammad SAW

Polres Gelar Santunan pada Maulid

LEBAK, BANPOS - Polres Lebak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/ 2026 dengan menggelar kegiatan keagamaan sekaligus santunan kepada anak yatim di Masjid Al Fitrah Polres Lebak. Kamis (27/8).

Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi seluruh personil untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu mengangkat tema 'Dengan Meneladani Akhlak

Rasulullah SAW melalui Polri Presisi, Kita Wujudkan Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur'.

Acara dihadiri Kapolres Lebak AKBP Arninsi Wakapolres Lebak Kompol Eddy Prastyo, Para PJU Polres Lebak, Pengurus Bhayangkari Cabang Lebak, Personil Polres Lebak, ASN dan Penceramah Ustadz Deden.

Kapolres Lebak AKBP Arninsi mengatakan, peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali keteladanan Rasulullah SAW, khususnya dalam hal kejujuran, kesabaran, kepedulian, keadilan dan kasih

sayang terhadap sesama. Belirlengkapan Taktis.

"Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita bersama-sama meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas. Sebagai anggota Polri, kita harus mampu memberikan pelayanan yang humanis, hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat bagi sesama," ujar Kapolres.

Pada giat, Kapolres Lebak juga memberikan santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian dan perhatian Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan.

Arninsi menambahkan, nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW diharapkan dapat semakin memperkuat semangat personel Polres Lebak dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas dan penuh tanggung jawab.

“Semoga melalui kegiatan ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel, mempererat silaturahmi serta menumbuhkan kepedulian sosial. Dengan semangat meneladani akhlak Rasulullah SAW, kita wujudkan Polri yang Presisi dan semakin dicintai masyarakat,” terangnya.(WDO/RUS)

ini Iklan

**Bingung...??
di sini
aja....**

INFO PEMASANGAN IKLAN
081334404392
087808831183

STOP PENYEBARAN VIRUS COVID-19

MEMAKAI Masker

MENCUCI Tangan

MENJAGA Jarak

BANPOS

"Toga Sehat Ma Sebelum datang Rasa Sakit Ma"

www.banpos.co
banten_pos
banten_pos
banpos channel

Pena Fokus Bertahap di Liga

Persita Targetkan Delapan Besar

TANGERANG, BANPOS - Klub sepak bola kebanggaan masyarakat Banten, Persita Tangerang, resmi mengumumkan skuad untuk mengarungi kerasnya kompetisi domestik. Target tinggi langsung dicanangkan manajemen demi mendongkrak muruah tim. Presiden Klub Persita Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, menginstruksikan pasukannya untuk mampu menembus dominasi papan atas klase-men Super League.

Target ambisius itu dipatok setelah klub hanya sanggup finis pada urutan kesepuluh musim lalu. Peluncuran seragam tempur dan daftar pemain ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan tim.

“Target di liga tentu saja papan atas tadi, delapan besar ya,” kata Zaki.

Sang nahkoda tim asal Spanyol, Carlos Pena, justru mencoba meredam tingginya ekspektasi publik. Pelatih kawakan ini memilih pendekatan taktik selangkah demi selangkah tanpa terbebani tekanan wajib juara liga. Fokus utamanya saat ini murni pada perbaikan tingkat konsistensi permainan.

“Tidak ada tekanan. Kami tidak memiliki tekanan untuk gelar juara,” ungkap Pena tenang. “Tentu, kami ingin membawa Persita berada di posisi setinggi mungkin,” tambahnya kemudian.

Manajemen telah mendaratkan total enam pemain anyar pada bursa transfer pemain kali ini. Rombongan amunisi baru itu diharapkan mampu mendongkrak daya gedor kualitas skuad utama. Deretan namaENTERING seperti Tyronne del Pino kini resmi berseragam kebanggaan skuad ungu.

Isu santer peminjaman juru gedor Persib, Ramon Tangué, masih terus menggantung. Baik pihak pelatih maupun jajaran presiden klub ma-



Peluncuran tim Persita Tangerang untuk musim 2026/27 di Tangerang, Kamis (27/8/2026).

sih enggan memberikan kepastian mutlak terkait manuver transfer pamungkas tersebut. Keduanya menegaskan segala kemungkinan penambahan pemain sebelum tenggat waktu akan dievaluasi sak-sama.

“Kita serahkan kepada coach Pena nanti. Kalau dia bilang butuh,

ya kita usahakan,” kata Zaki.

Kendala besar terpaksa dihadapi klub terkait markas utama pertandingan kandang mereka. Kerusakan parah di atap Indomilk Arena memaksa skuad berpindah markas sementara. Seluruh jadwal partai kandang bakal dilangsungkan di Banten International Stadium se-

tidaknya hingga bulan November.

Sang pelatih menolak keras menjadikan faktor stadion sementara tersebut sebagai sebuah kambing hitam penurunan performa. Skuad racikannya dituntut selalu tampil trengginas meraup angka maksimal di setiap laga. Adaptasi cepat terhadap rumput

stadion alternatif harus segera dikuasai oleh pemain.

“Kami akan berusaha bersaing di setiap pertandingan, di mana pun kami bermain. Jadi, saya tidak berpikir hal itu akan memengaruhi kami,” tegas Pena optimistis.

Ban kapten utama klub kini secara resmi disematkan pada lengan

Javlon Guseynov. Legiun asing tangguh asal Uzbekistan ini menggantikan posisi krusial Muhammad Toha yang sebelumnya didapuk sebagai pimpinan. Pengalaman panjang sang palang pintu pertahanan ini sangat diharapkan mampu membimbing para pemain belia lainnya berlaga. (ANT/AZM)



The Jakmania Boikot Peluncuran Tim Persija

JAKARTA, BANPOS - Suporter militan klub sepak bola ibukota mengancam memboikot acara peluncuran tim terbaru. Kenaikan harga tiket pertandingan persahabatan memicu gelombang protes keras dari basis penggemar setia. Keputusan sepihak ini dinilai sangat memberatkan para pendukung yang selalu memenuhi stadion.

Manajemen klub dikabarkan menaikkan harga tiket masuk secara drastis bagi para penonton laga pramusim. Harga kategori tribun bawah dipastikan mengalami lonjakan sebesar seratus lima puluh ribu rupiah. Kenaikan tarif tersebut rupanya belum mencakup tambahan biaya pajak serta potongan administrasi.

“Atas dasar hal tersebut, The Jakmania menyatakan memboikot pertandingan uji coba Persija Jakarta melawan Brisbane Roar FC pada tanggal 29 Agustus 2026,” tulisnya.

Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, merespons ancaman serius pemboikotan massa tersebut. Ia membantah keras kabar burung mengenai kenaikan harga tiket daring hingga mencapai tujuh puluh persen. Tarif yang melambung tinggi tersebut murni dikhususkan untuk sistem skema penjualan daring masyarakat umum.

Pihak manajemen memastikan selalu ada jalur distribusi harga

husus bagi para anggota kelompok pendukung. Jalur istimewa ini dikelola serta dikoordinasikan langsung melalui pengurus pusat beserta setiap koordinator wilayah. Langkah taktis ini diwujudkan demi menghargai dedikasi sejarah panjang penggemar bagi kejayaan identitas kota.

“Artinya, ada alokasi tiket khusus bagi pendukung setia kami, The Jakmania, yang akan didistribusikan melalui pengurus pusat The Jakmania dan koordinator wilayah masing-masing,” ujarnya.

Legenda hidup klub sepak bola itu memberikan sudah menghubungkan ketua umum kelompok suporter secara personal. Komunikasi darurat ini bertujuan mendinginkan suasana panas menjelang laga uji coba penutup pramusim. Kehadiran para pendukung militan di tribun stadion megah dianggap sebagai urat nadi perjuangan tim.

Pertandingan akbar melawan klub elit luar negeri Brisbane Roar tersebut akan digelar pertengahan minggu ini. Pihak manajemen sangat memohon agar para pendukung garis keras sudi kembali memenuhi kursi stadion. Petinggi klub amat meyakini krisis internal perselisihan ini pasti akan segera menemukan jalan tengah.

“Semoga itu tidak dalam waktu yang lama,” pungkas sang legenda penuh harap menutup sesi wawancara. (CR02/AZM)

WBC Umumkan duel Tiara Brown lawan Scotney

JAKARTA, BANPOS - World Boxing Council (WBC) mengumumkan juara dunia kelas bulu putri (57,2 kg) Tiara Brown akan menghadapi mantan juara dunia sejati kelas super bantam putri (55,3 kg) Ellie Scotney dalam pertarungan mempertahankan gelar.

“Tiara Brown, juara yang belum terkalahkan, akan berusaha mempertahankan gelar juara dunianya melawan penantang berbahaya Ellie Scotney,” demikian keterangan WBC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Pertarungan itu menjadi

salah satu dari empat laga perebutan gelar dunia yang akan ditampilkan dalam ajang MVPW-07.

Brown datang dengan catatan sempurna, yakni 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui *knockout* (KO). Petinju asal Amerika Serikat itu menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di kelas bulu putri setelah berhasil merebut gelar WBC dan mempertahankan dalam penampilan berikutnya.

Brown merebut sabuk juara dunia kelas bulu WBC pada Maret 2025 setelah mengalahkan petinju Australia, Skye Nicolson. Kemenangan tersebut sekaligus memberikan kekalahan pertama bagi Nicolson dalam karier profesionalnya.

Setelah menjadi juara, Brown kemudian menjalani pertahanan gelar pertamanya pada Juni 2026. Dia mempertahankan sabuk tersebut setelah mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka.

Pada 2026, Brown menghadapi tantangan yang berbeda. Lawannya adalah Scotney, petinju Inggris yang memiliki pengalaman sebagai juara dunia sejati di kelas super bantam putri.

Scotney telah menguasai empat sabuk utama yaitu WBC, WBA, IBF, dan WBO. Pencapaian tersebut menempatkan salah satu petinju putri terbaik di kelas sebelum memutuskan naik ke divisi kelas bulu. Sebelumnya, Scotney meng-

osongkan gelar WBC kelas super bantam untuk mengejar tantangan baru di kelas bulu. Langkah tersebut membuka peluang untuk mencatat sejarah sebagai juara dunia di dua divisi.

Pertarungan melawan Brown akan menjadi ujian pertama Scotney guna menaklukkan divisi baru. Dia harus menghadapi petinju yang belum terkalahkan dan memiliki keunggulan pengalaman bertanding di kelas bulu.

WBC menyatakan duel Brown melawan Scotney menjanjikan pertarungan menarik antara juara dunia tak terkalahkan dan mantan juara sejati yang tengah mengejar gelar di divisi kedua. (ANT/AZM)

Cilegon Offroad Sukses Bangkitkan Ekonomi Warga

CILEGON, BANPOS - Perhelatan Cilegon Offroad Challenge Hard Adventure 4x4 amat memacu roda ekonomi. Acara mobil terjal ini pun sukses digelar di Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeber.

Kesuksesan balap ini dipuji oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra. Ia menilai perhelatan otomotif tersebut berimbas sangat positif bagi dompet warga sekitar.

“Dimana hunian hotel di Kota Cilegon semuanya terisi oleh peserta pada saat event digelar. Kemudian juga pelaku UMKM mendapat keuntungan dari event

tersebut,” terang Aziz.

Pemerintah sah menerima piagam penghargaan atas kelancaran turnamen itu. Bentuk apresiasi diserahkan Kamis oleh perwakilan pengurus komunitas panitia pelaksana.

Ketua Panitia Pelaksana COC Hard Adventure 4X4, Iskandar, menjadi tokoh penyerah plakat itu. Pihaknya menyatakan birokrasi kota sangat berperan vital mendukung kegiatan tersebut.

“Kedatangan kami selaku Panpel COC Hard Adventure klub AAJ bersama pengurus IOF Cilegon untuk memberikan penghargaan

kepada Pak Aziz,” kata Iskandar.

Ajang balap ini sukses menarik seratus lebih pengemudi perwakan dari perkumpulan jalaan. Puncak partisipasi aktif itu terjadi tepat pada hari dimulainya turnamen pacu kendaraan ekstrem.

Ketua Indonesia Offroad Federation Pencab Kota Cilegon, Ana Sudana, mengonfirmasi pencapaian balapan itu. Acara berkapasitas tujuh puluh mobil ini nyatanya disambut antusiasme massa yang spektakuler.

“Perdana di Kota Cilegon, sukses dalam penyelenggaraan tanpa ada gangguan atau hambatan. Dari

jumlah peserta luar biasa, kemungkinan tahun depan kami akan mengadakan lagi dan mohon supportnya,” ucap Dana.

Ajang tanpa penyebaran woroworo masif ini sukses memoles potensi alam perbukitan Kelurahan Cikerei. Bidang tanah tak rata tersebut kini sah didapuk menjadi destinasi sirkuit wisata seru.

Kolaborasi masyarakat awam dan elemen pemerintahan kota diharapkan terus terjalin harmonis. Sinergi cemerlang mutlak diper-tahankan demi pelestarian sekaligus kenaikan taraf kesejahteraan masyarakat. (BARI/AZM)



Ketua panitia COC Hard Adventure 4x4 Iskandar dan Ketua IOF Cilegon Ana Sudana saat memberikan penghargaan kepada Pj Sekda Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra di Cilegon, Kamis (27/8).



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS



Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kamis (27/8), meminta warga untuk melapor ke DKCS bila ada keluarga yang meninggal.

Pemkot Minta Data PBI BPJS Kesehatan Diperbarui

CILEGON, BANPOS - Pemerintah Kota Cilegon meminta aparaturnya kewilayahan memperkerat pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Warga yang meninggal dunia diminta segera dilaporkan agar kepesertaan dapat diperbarui dan bantuan tidak salah sasaran.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, camat dan lurah perlu mengoptimalkan peran RT dan RW dalam melaporkan perubahan data kependudukan. Pelaporan kematian warga menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan data peserta PBI sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Jangan sampai orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima. Karena itu, setiap ada warga yang meninggal harus segera dilaporkan dan diurus akta kematiannya,” ujar Aziz, Kamis (27/8).

Saat ini, program PBI BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemkot Cilegon mencakup lebih dari 100 ribu peserta. Besarnya cakupan tersebut membuat akurat data menjadi penting agar kepesertaan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria. Aziz mengatakan, ketika peserta meninggal dunia, perubahan data kependudukan harus segera diproses. Data tersebut kemu-

dian menjadi dasar penyesuaian kepesertaan PBI sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau ada yang sudah meninggal, kepesertaannya bisa dihentikan sesuai mekanisme. Kuota yang ada kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat kurang mampu lainnya yang memang membutuhkan,” katanya.

Menurut Aziz, RT dan RW memiliki posisi penting dalam proses pemutakhiran data karena berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat. Informasi dari tingkat lingkungan tersebut dapat menjadi dasar bagi lurah dan camat untuk segera meneruskan perubahan data kepada instansi terkait.

Pemkot Cilegon berharap pemutakhiran data tidak hanya mengurusi ketidaksesuaian data peserta PBI, tetapi juga memastikan anggaran jaminan kesehatan daerah digunakan secara efektif. Peserta yang sudah meninggal dapat dikeluarkan dari daftar sesuai prosedur, sementara kuota yang tersedia dapat diberikan kepada warga kurang mampu lainnya yang membutuhkan.

Dengan pemutakhiran data secara berkala, Pemkot Cilegon menargetkan data kependudukan dan data penerima manfaat program jaminan kesehatan dapat semakin akurat. Langkah tersebut sekaligus untuk mencegah penggunaan anggaran daerah bagi peserta yang sudah tidak lagi memenuhi status sebagai penerima manfaat. (CR03/PAY)

CILEGON, BANPOS - Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Cilegon mulai menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Perubahan jumlah penduduk berpotensi memengaruhi alokasi kursi DPRD Kota Cilegon serta pembagian daerah pemilihan (dapil) pada pemilu mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Azhari mengatakan, pemantauan dilakukan melalui pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Data tersebut menjadi salah satu acuan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk di Kota Cilegon. “Pada prinsipnya potensi kenaikan jumlah penduduk ada lagi di tahun depan. Kalau melihat potensi yang disampaikan tadi ada sekitar dua belas ribu, semoga tahun depan bertambah jumlah penduduk,” ujar Alam kepada BANPOS di Gedung Kominfo Kota Cilegon, Kamis (27/8).

Menurut dia, pertambahan jumlah penduduk dapat berdampak terhadap alokasi kursi DPRD. Namun, Bawaslu masih menunggu perkembangan data kependudukan sebelum melihat kemungkinan perubahan konfigurasi politik dan pemilu di Kota Cilegon. “Efeknya nanti ada jumlah kursi di dewan dengan jumlah penduduk di Kota Cilegon. Pada prinsipnya kita ikuti perkembangan dulu melalui Bawaslu, bagaimana jumlah penduduk di Kota Cilegon,” katanya.

Selain alokasi kursi, perubahan jumlah penduduk juga berpotensi memengaruhi pembagian dapil. Sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Citangkil dan Ciwandan,

DPKC Dihidupkan, Jembatani Keterbatasan Kewenangan Pendidikan



Prosesi deklarasi Dewan Pendidikan Kota Cilegon, Kamis (27/8).

CILEGON, BANPOS - Keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota Cilegon dalam menangani seluruh jenjang pendidikan menjadi salah satu alasan dihidupkannya kembali Dewan Pendidikan Kota Cilegon (DPKC). Lembaga tersebut

diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pembangunan pendidikan di Kota Cilegon.

Walikota Cilegon, Robinsar

menyambut baik deklarasi dan kembali aktifnya DPKC. Ia berharap keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi saluran tambahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan masukan terhadap



Ketua Bawaslu Cilegon, Alam Arcy Azhari saat di wawancara.

disebut dapat menjadi bagian dari pembahasan jika terjadi perubahan konfigurasi dapil. Meski demikian, Alam menegaskan perubahan dapil tidak dapat dilakukan secara langsung. Penetapannya harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk melalui uji publik. “Untuk sejauh ini kita masih memantau dulu. Secara pengawasan tentunya Bawaslu dalam koridor regulasi yang ada, prosedur dapat tahapan prosedural dilalui

sesuai undang-undang. Kita juga masih menunggu undang-undang kepengawasan terbaru,” ujarnya.

Ia mengatakan, perubahan dapil nantinya juga dapat menambah tantangan pengawasan. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda sehingga diperlukan pemetaan dan pengawasan yang lebih cermat. “Kalau ada pemekaran daerah pemilihan dan potensi-potensi lain yang bertumbuh, tentu ada beragam tantangan karena setiap wilayah memiliki karakteristik

masing-masing,” katanya.

Di sisi lain, rencana penambahan jumlah anggota Bawaslu Kota Cilegon dari tiga menjadi lima orang dinilai dapat memperkuat pengawasan. Penambahan tersebut diharapkan membuat pembagian tugas antar-divisi lebih proporsional. “Kalau tiga ini kan pastinya ada double divisi, tapi kalau nanti bertambah dua lagi akan meringankan kerja-kerja divisi. Upaya-upaya itu pasti kita pantau,” pungkasnya. (CR03/PAY)

CILEGON, BANPOS - Dua dekade menjadi waktu panjang bagi basket Cilegon untuk kembali meraih medali emas. Prestasi terakhir diperoleh pada ajang Porprov atau Porda Provinsi Banten 2006. Catatan tersebut kini menjadi pijakan sekaligus tantangan bagi kepengurusan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Cilegon periode 2026-2030.

Mantan Ketua Umum sekaligus Penasihat Perbasi Cilegon, Wawan Mulyana, menilai target mengembalikan kejayaan basket Cilegon harus dibangun melalui sistem pembinaan yang terarah dan terukur.

Menurutnya, pengalaman pada 2006 membuktikan bahwa prestasi dapat diraih ketika pembinaan dila-

jumlah pemain Cilegon, seperti Imam dan Iqbal, bahkan mampu menembus skuad Pra-PON hingga berlaga di PON di Kalimantan dan finis di peringkat keenam. “Sekarang Perbasi harus mampu berkomunikasi dengan baik antar-lini pengurus. Kemudian harus melihat bagaimana talent spotting, yaitu mencari atlet-atlet berbakat. Jangan sungkan mengeluarkan anggaran, itu wajar,” ujar Wawan kepada Banpos, beberapa hari lalu.

Ia mengatakan, pencarian atlet berbakat harus diikuti dengan pembinaan yang konsisten. Pengalaman sebelumnya, kata Wawan, menunjukkan pentingnya menempatkan atlet di lingkungan latihan yang mampu

meningkatkan kualitas dan mental bertanding. “Dulu kita mengirim atlet ke Ragunan Training Center. Alhamdulillah akhirnya menghasilkan prestasi yang bagus. Artinya, fokus, visi dan misi harus jelas, arah tujuannya ke mana,” katanya.

Wawan juga menilai dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali prestasi basket Cilegon. Menurut dia, peluang tersebut terbuka karena kepengurusan saat ini memiliki kapasitas untuk membangun dukungan kelembagaan dan pembiayaan pembinaan. “Harusnya mampu, karena beliau memiliki background basket dan posisi yang baik. Saya berharap aspek finansial juga didukung oleh

pemerintah,” tuturnya.

Meski demikian, Wawan mengingatkan anggaran bukan satu-satunya kunci. Pengurus harus memastikan setiap program pembinaan berjalan sesuai target melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala. “Aspek monitoring dan evaluasi harus ketat. Dulu saya juga ketat. Tidak ada suatu keinginan yang luhur jika kita jalani dengan baik dan telaten, pasti tujuan itu akan tercapai,” ujarnya.

Selain pembinaan atlet, ia mendorong Perbasi memperkuat ekosistem basket di Cilegon. Pengembangan sumber daya manusia tidak cukup hanya menyasar pemain, tetapi juga pelatih dan wasit. “Tidak hanya membangun sumber daya atlet, tapi juga sumber daya

yang lain seperti pelatih dan wasit. Kalau hanya bisa main tapi tidak memahami aturan dan tidak ada wasit yang menggambarkan aturan dalam permainan, tidak bisa juga,” katanya.

Menurut Wawan, pemain, pelatih, wasit dan pengurus merupakan satu kesatuan dalam membangun prestasi. Karena itu, pembinaan harus dilakukan secara menyeluruh agar kompetisi dan kualitas atlet dapat berkembang secara berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya menjangkau atlet sejak usia dini. Minat terhadap basket yang tumbuh di lingkungan sekolah dapat menjadi pintu masuk untuk membangun basis atlet sebelum diarahkan ke jenjang prestasi. “Kalau bas-

ket ini sudah dicintai oleh murid usia dini, gampang. Dari situ selanjutnya menuju prestasi,” katanya.

Dengan pengalaman emas pada 2006 dan potensi pembinaan yang masih terbuka, Wawan berharap kepengurusan Perbasi Cilegon periode 2026-2030 mampu menjadikan medali emas sebagai target yang dibangun melalui sistem pembinaan, bukan sekadar ambisi. “Saya berharap kepengurusan 2026-2030 ini bisa menghasilkan apa yang menjadi tujuan ketua. Itu menjadi kiblat basket Banten dan bisa dapat emas. Saya akan bangga ketika mendapatkan emas kembali. Atletnya bisa maju dan pengurusnya bisa berkembang,” pungkasnya. (CR03/PAY)

OPD Diminta Sediakan Petugas Bahasa Isyarat

SERANG, BANPOS – Penyang-dang disabilitas di Kota Serang meminta seluruh Organisasi Pe-rangkat Daerah (OPD) menyedi-akan petugas pelayanan yang mampu menggunakan ba-hasa isyarat. Selain itu, fasilitas dan pelayanan publik juga diha-rapkan semakin ramah dan mu-dah diakses oleh penyangdang disabilitas.

Dorongan tersebut disampai-kan Ketua Perkumpulan Pen-nyandang Disabilitas Indonesia

(PPDI) Kota Serang, Teguh Sulistyabadi, dalam Rapat Fo-rum Konsultasi Publik yang me-libatkan organisasi penyangdang disabilitas dan berbagai elemen masyarakat di Lantai 3 Aula Setda Kota Serang, Kamis (27/8).

Teguh mengatakan, kemampu-an petugas pelayanan dalam menggunakan bahasa isyarat penting untuk memastikan warga tuna rungu dapat memperoleh pelayanan publik tanpa meng-

BACA OPD HAL-8

‘Kejar Berbudi’ Sasar 8 Sekolah Dasar

SERANG, BANPOS – Pemkot Se-rang kembali mengembangkan program Kejar Berbudi dengan menyasar siswa sekolah dasar (SD) negeri. Program yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terse-but diharapkan dapat membentuk kebiasaan menabung sejak dini.

Asda II Kota Serang Yudi Suryadi

mengatakan, program Kejar Ber-budi sebelumnya telah menyasar jenjang sekolah menengah per-tama (SMP). Tahun ini, program tersebut diperluas ke jenjang SD negeri.

“Nah sekarang kita mengem-bangkan program Kejar Berbudi di jenjang SD Negeri,” ujar Yudi, Kamis (27/8).

Yudi menjelaskan, pada tahap awal program Kejar Berbudi me-nyasar delapan SD negeri di Kota Serang. Di antaranya SD Negeri 02 Serang, SD Negeri Kuranji, dan SD Negeri Harjamukti.

“Sementara ini baru awal dela-pan SD Negeri, tapi tidak menutup kemungkinan bisa berkembang. Misalkan sekolah-sekolah yang

lain ingin silakan,” jelas dia.

Menurut Yudi, setelah peluncur-an program, tahapan berikutnya yakni melakukan sosialisasi ke-pada orang tua murid dan para guru. Hal tersebut penting karena keikutsertaan siswa dalam pro-gram Kejar Berbudi bersifat sukarela.

BACA KEJAR HAL-8



DZKI OKTOMAU/AYDI /BANTEN POS

PENGAJUAN KUR UMKM TANPA AGUNAN.

Penjual oleh-oleh khas Banten melayani pembeli di tokonya di Unyur, Kota Serang, Kamis (27/8). Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan dalam bentuk apa pun serta masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara atau membayar biaya untuk memperoleh akses KUR.

LEBIH MUDAH
AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL
BANTEN POS

BP
BANPOS

DOWNLOAD SEKARANG
APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

Google Play

PORTAL BERITA
E- PAPER
YouTube Channel

banpos channel www.banpos.co banpos@banpos.co.id banpos_pos banpos_pos

Enam Hakim Layani 35 Kecamatan Serang



Humas Pengadilan Agama Serang, Fathullah Hakim

SERANG, BANPOS - Kondisi be-ban kerja operasional harian ins-tansi yudikatif wilayah daerah ini memang diakui terbilang amat sa-ngat berat. Total enam hakim la-yani 35 kecamatan pada luasnya

wilayah teritorial hukum Penga-dilan Agama (PA) Serang. Seluruh jajaran personel inti tersebut harus ketat sungguh mutlak diperlukan agar kaum muda tidak tersesat terlampau jauh.

Dimyati juga meminta seluruh pemuda daerah untuk tidak sem-barangan masuk ke dalam sirkel pertemanan. Pemilihan lingkung-an sirkulasi sosial yang sangat kon-struktif bakal mendorong tercipta-nya rentetan prestasi unggul. Pe-rilaku sangat positif dari rekan se-jawat pasti mampu menularkan energi kebaikan.

“Gabunglah dengan orang-orang yang konstruktif, gabunglah dengan orang-orang yang

BACA REMAJA HAL-8

rang, Fathullah Hakim, mengonfir-masi luasnya jangkauan wilayah operasional peradilan tingkat per-tama tersebut. Institusi negara ini melingkupi 29 kecamatan Kabu-paten Serang serta enam wilayah terpadu Kota Serang. Tingkat ke-padatan volume layanan persi-dangan terus melonjak naik secara signifikan setiap harinya.

“Ditambah, perlu diketahui bah-wa di kita ini di Serang juga mudah-mudahan bisa masuk itu, adanya jumlah hakim yang sangat terba-tas,” terang Fathullah.

Total keseluruhan daftar perso-nel pengadil tersebut bahkan su-dah meliputi penetapan jabatan posisi ketua beserta wakil ketua. Ketimpangan drastis antara ledak-

an jumlah pendaftar perkara de-ngan kuantitas petugas sangatlah tidak ideal. Keterbatasan sumber daya manusia ini merupakan per-soalan gawat darurat yang sangat membutuhkan intervensi nyata.

Pengadilan Agama Serang turut mencatatkan adanya lonjakan laju angka gugatan yang berhasil masuk mencapai total sekitar 3.171 kasus. Jenis perkara hukum ini mayoritas selalu didominasi penuh oleh proses peradilan persengketaan murni kontensius. Klasifikasinya juga tidak sekadar sebatas pada sengketa pengesahan perceraian semata.

“Gugatan itu mencakup tentang gugatan perceraian, cerai talak, terus hak asuh anak,” terang Fathullah.

BACA ENAM HAL-8

Remaja Wajib Pintar Pilih Lingkungan Bergaul

SERANG, BANPOS - Kalangan ge-nerasi muda selalu dituntut harus ekstra cerdas serta pintar pilih ling-kungan bergaul kesehariannya. Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, secara tegas meng-ingatkan kembali besarnya dam-pak pergaulan. Pembangunan mental pemuda ini bukan sekadar tanggung jawab pendidikan mau-pun pihak pemerintah.

Peran pengawasan dari orang tua amat sangat menentukan arah kualitas watak anak sejak fase usia pubertas. Figur ayah dan ibu wajib senantiasa memberikan sebuah keteladanan moral yang sangat baik. Segala bentuk perilaku buruk orang dewasa amat rentan ditiru secara langsung oleh para remaja.

“Orang tua itu harus bisa men-jadi contoh, menjadi uswah bagi anaknya, jangan sampai orang tua memberikan contoh yang tidak baik,” kata Dimyati.

Lompatan pesat teknologi in-formasi masa kini membuka keran pertukaran budaya global secara tak terbatas. Serbuan ragam bu-daya asing tersebut diibaratkan persis seperti dua sisi mata pisau berbahaya. Pendampingan ekstra ketat sungguh mutlak diperlukan agar kaum muda tidak tersesat terlampau jauh.

Dimyati juga meminta seluruh pemuda daerah untuk tidak sem-barangan masuk ke dalam sirkel pertemanan. Pemilihan lingkung-an sirkulasi sosial yang sangat kon-struktif bakal mendorong tercipta-nya rentetan prestasi unggul. Pe-rilaku sangat positif dari rekan se-jawat pasti mampu menularkan energi kebaikan.

“Gabunglah dengan orang-orang yang konstruktif, gabunglah dengan orang-orang yang

BACA REMAJA HAL-8





OPD Diminta...

Sambungan dari Halaman 7

hadapi kendala komunikasi.

“Teman-teman tuli rata-rata menggunakan bahasa isyarat dan tidak semua orang mengerti apa yang mereka butuhkan. Kami berharap di setiap OPD ada petugas pelayanan umum di garis depan yang memahami bahasa isyarat agar warga difabel tidak kesulitan,” ujarnya.

Menurut Teguh, penyediaan petugas yang memahami bahasa isyarat menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang inklusif. Dengan demikian, penyandang tuna rungu dapat menyampaikan kebutuhan maupun memperoleh informasi pelayanan secara lebih mudah.

Selain kemampuan bahasa isyarat, Teguh meminta Pemkot Serang memperhatikan aksesibilitas fasilitas fisik di setiap OPD. Menurutnya, sarana dan prasarana pemerintahan harus dirancang agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, termasuk pengguna kursi roda dan penyandang tuna netra.

Fasilitas tersebut antara lain ramp dengan kemiringan yang sesuai, permukaan yang tidak licin, serta dilengkapi pegangan untuk pengguna kursi roda.

Ia juga menyoroti keberadaan guiding block yang harus bebas dari berbagai rintangan agar dapat digunakan secara optimal oleh penyandang tuna netra.

“Jangan sampai guiding block yang sudah dibuat justru terhalang oleh benda-benda lain, sehingga teman-teman tuna netra tidak bisa menggunakannya dengan baik,” kata Teguh.

Selain itu, fasilitas toilet yang ramah disabilitas juga dinilai perlu tersedia di lingkungan perkan-

toran pemerintah. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas ketika mengakses pelayanan pemerintahan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asda III Kota Serang, Subagyo, mengatakan Pemkot Serang akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang inklusif.

“Masukan dari forum difabel terkait pelayanan yang ramah disabilitas menjadi bahan evaluasi perbaikan ke depan. Kami akan laporkan kepada pimpinan dan TAPD agar penyediaan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas SDM pelayanan dapat dianggarkan,” kata Subagyo.

Subagyo menyampaikan, Pemkot Serang berencana menyiapkan Juru Bicara Isyarat (JBI) maupun memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada petugas pelayanan di lini depan OPD.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, khususnya warga tuna rungu yang membutuhkan pelayanan secara langsung di kantor pemerintahan.

Di sisi fasilitas, Pemkot Serang juga akan mendorong pembenahan gedung perkantoran, termasuk penambahan lift, perbaikan bidang miring bagi pengguna kursi roda, serta pemasangan pelapis karet antislip.

Subagyo menegaskan, berbagai masukan dari organisasi penyandang disabilitas akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah dalam memperbaiki sarana dan kualitas pelayanan publik.(CR02/AZM)

Remaja Wajib...

Sambungan dari Halaman 7

berprestasi, gabunglah dengan orang-orang yang baik, gabunglah dengan orang-orang yang saleh dan salehah,” katanya.

Pemilihan keputusan pergaulan pada tahap masa transisi krusial ini sama sekali tidak boleh menemui salah. Remaja sangat berisiko besar terjerumus parah saat nekat melakukan berbagai tindak pelanggaran hukum berat. Salah melangkah pada titik rentan persimpangan hidup ini kerap berujung pada efek sangat fatal.

Kepala Dinas P3AKKB Provinsi Banten, Iwan Ardiansyah, turut menambahkan perspektif krusial mengenai urgensi pembinaan. Ia menegaskan dengan lantang bahwa orang tua wajib terus berjalan beriringan menjawab tantangan modern. Setiap perkembangan anak diibaratkan persis layaknya nasib bidak pion catur di atas papan.

“Anak pion, kecil, yang kata Pak

Wagub tadi langkahnya satu per satu, lama sekali, tapi dia bisa menjadi semuanya. Dia bisa jadi segalanya,” kata Iwan.

Serbuan arus informasi dari gawai membuat pengawasan pihak keluarga kini menjadi kian berat. Nasihat di rumah kerap langsung meluntur akibat hantaman dari pergaulan bebas dunia luar. Perlindungan utuh keluarga kini harus menjadi garda penyelamat nasib kemajuan bangsa.

Investasi sosial jangka panjang berupa pendidikan karakter ini merupakan wujud modal dasar pembangunan daerah termutakhir. Pengawasan khusus perihalanah pertemanan wajib terus dikawal agar tidak menimbulkan efek destruktif fatal. Generasi emas dipastikan segera lahir berkat bimbingan intensif dari keluarga harmonis.

“Harapannya di 2045 kita punya Generasi Emas yang bagus, yang jadi modal dasar pembangunan,” pungkas Iwan.(MPD/AZM)

SERANG

Ancaman Bonus Demografi

Siapkan Mental Generasi Muda

SERANG, BANPOS - Tantangan bonus demografi masa kini menuntut tingkat kesiapan mental yang tangguh dari seluruh kalangan pelajar. Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, memperingatkan bahwa krisis moralitas kependudukan ini berpotensi besar merusak cita-cita generasi masa depan.

Bahaya peredaran gelap narkoba dan jerat mematikan judi daring kini menjadi ancaman laten sosial yang kian sangat memprihatinkan. Para siswa diwajibkan terus membekali diri dengan ketahanan mental baja sekaligus kedalaman ilmu pengetahuan saat pembukaan turnamen FLIGHT 236, Kamis (27/8).

“Pelajar harus memiliki mental dan ilmu yang kuat agar mampu menghalau berbagai pengaruh negatif,” tegas Najib.

Generasi belia ini sangat diharapkan sudi mengasah ragam kemampuannya lewat partisipasi aktif pada segala jenis kegiatan sosial positif. Ekosistem pondok pesantren resmi didapuk sebagai instrumen pendidikan utama demi membentuk pilar karakter luhur para murid Banten tercinta ini.

Persaingan arena dunia kerja pada masa kelak bakal jauh lebih agresif menguji kapasitas ragam variasi keterampilan teknis manusia. Kalangan muda wajib memantapkan kompetensi dasar sejak dini supaya mereka selalu sanggup menghadapi brutalnya arus peredaran globalisasi dunia modern.

“Siapa yang memiliki kompetensi dan kemampuan unggul, maka dia akan diperhitungkan,” ujar Najib.

Acara turnamen olahraga prestisius tersebut secara bertahap menjelma sebagai medium pelatihan terpadu bagi gairah kelestarian minat bakat santri. Kompetisi



ini dibentuk khusus demi mendorong rasa keberanian interaksi sosial ruang lingkup pelajar.

Rangkaian kompetisi akbar tahunan tersebut rupanya dikelola secara otonom penuh oleh barisan santri tangguh Nurul Fikri Boarding School. Pembina pelaksana FLIGHT 236, Nico Cahya Pratama, kini mengungkap makna historis mendalam dari pemilihan label kejuaraan ajang edisi kali ini.

“Kegiatan ini merupakan agen-

da tahunan yang dilaksanakan oleh santri NFBS,” kata Nico.

Kode identitas unik turnamen olahraga itu sengaja disematkan sebagai persembahan dedikasi paripurna panitia santri angkatan dua puluh tiga. Perhelatan adu ketangkasan dijadwalkan berlangsung meriah sejak tanggal 26 hingga berakhir tepat pada tanggal 29 Agustus pada pertengahan tahun 2026.

Total sebanyak 1.200 perwakilan

dari 40 sekolah berbeda terdaftar resmi guna beradu nasib meraih gelar kejuaraan prestisius. Mereka bersiap berkompetisi pada kelas seni lukis dinding, turnamen futsal bergengsi, perlombaan bulu tangkis, serta hingga ajang rilis film pendek.

“Harapannya kegiatan ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk meningkatkan skill, kreativitas, sekaligus memperluas silaturahmi dengan pelajar dari berbagai sekolah di Indonesia,” harap Nico.(MPD/AZM)

Kejar Berbudi...

Sambungan dari Halaman 7

“Program ini tidak ada paksaan. Kita juga tidak mewajibkan setiap anak harus ikut program Kejar Berbudi. Khawatir ya. Silakan yang sukarela,” tegasnya.

Yudi menambahkan, sekolah yang sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan perbankan tetap dapat melanjutkan kerja sama tersebut. Sementara bagi sekolah yang belum memiliki mitra perbankan, Pemkot Serang akan berupaya merangkul sejumlah perbankan.

“Bagi yang belum nah kita coba, kita merangkul perbankan yang ada selain Bank Banten juga BJB,” katanya.

Ia mengatakan, Kejar Berbudi merupakan salah satu upaya membiasakan anak-anak menabung sejak usia dini. Program tersebut sekaligus diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai program yang telah berjalan di lingkungan sekolah.

“Supaya program kebiasaan menabung sejak dini ini bisa terlaksana di Kota Serang, selain dalam rangka membantu program-program yang lainnya khususnya di Kota Serang kita bersinergi dengan perbankan,” jelas Yudi.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Bank BJB KCK Banten Dani Sumardani mengatakan, Kejar Berbudi merupakan program kolaborasi antara Pemkot Serang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank In-



donesia (BI), perbankan, sekolah, serta seluruh pihak terkait.

“Nah program Kejar Berbudi ini mengajarkan anak untuk punya tujuan, disiplin, tanggungjawab dan kemampuan merencanakan masa depan. Dan kebiasaan itu dimulainya sejak SD, SMP, SMA,” ujar Dani.

Melalui program tersebut, Dani

berharap anak-anak tidak hanya memiliki kebiasaan menabung, tetapi juga mulai belajar mengelola keuangan secara bertanggung jawab.

Dani menjelaskan, program Kejar Berbudi diterapkan secara berjenjang mulai dari SD, SMP hingga SMA. Produk tabungan yang digunakan pun disesuaikan dengan ka-

rakteristik dan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

“Kalau tadi yang teman-teman lihat ada Simpanan Pelajar itu memang fokusnya ke anak-anak SD-SMP. Untuk yang SMA ada program transisi dari Simpanan Pelajaran kalau di kita ada My First,” katanya.(CR02/AZM)

Enam Hakim...

Sambungan dari Halaman 7

Kewenangan resmi instansi hukum daerah ini juga melingkupi agenda penyelesaian urusan paling krusial terkait perebutan jatah harta bersama. Kasus perebutan pembagian harta warisan serta gugatan sengketa pembatalan hibah turut diadili secara saksama. Berbagai problem pelik perselisihan diranah urusan rumah tangga jelas menjadi rutinitas harian.

Pihak jajaran instansi pengadilan

an terpaksa melakukan manuver khusus guna menyalasi rasio tingginya tingkat beban perkara hukum tersebut. Skema pengerahan formasi hakim tunggal akhirnya diterapkan secara meluas demi mempercepat eksekusi agenda penyelesaian sengketa. Proses penanganan reguler melalui susunan komposisi majelis utuh dinilai sudah amat tidak relevan.

“Bahkan sekarang kita pakainya hakim tunggal, karena kalau pakai majelis kita enggak terkejar,” kata

Fathullah.

Pekerjaan berat para abdi peradilan tingkat pertama tak akan pernah usai ketika palu hukum dibunyikan nyaring di ruang persidangan. Tanggung jawab besar setiap penetapan perkara hukum harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral dimensi ilahi. Bayang kelanjutan deretan sengketa warga bahkan kerap terus menghantui siklus tidur pengadil tangguh.

Selain beban spiritual tersebut, institusi kebanggaan ini dipaksa

secara mandiri menghadapi berbagai kekeliruan asumsi publik terkait fungsi pengadilan. Fungsi krusial utama dari sebuah instansi peradilan hukum kerap kali disalahpahami sekadar sebagai tempat talak massal. Penduduk pun sangat sering nekat menyamakan pengadilan resmi ini dengan KUA.

“Supaya masyarakat paham, jangan gagal paham tentang kehadiran pengadilan atau kompetensi Pengadilan Agama,” tandas Fathullah.(CR02/AZM)

Pasang Iklan DI SINI AJA....

Info Lebih Lanjut:

081334404392 / 087808831183

banpos.id

www.banpos.id

banpos@gmail.com

banpos_pos

banpos_pos

RUU Perampasan...

Sambungan dari Halaman 1

negaskan komitmen tersebut.

“Limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026,” kata Dasco saat audiensi dengan AMPB.

Untuk memberikan kepastian dan membuka ruang pengawasan publik, dia pun menyatakan DPR akan menyiapkan salinan dokumen hasil rapat paripurna serta pernyataan tertulis mengenai komitmen tersebut. Masukan yang disampaikan AMPB, kata dia, akan diteruskan kepada Komisi III DPR RI sebagai bagian dari proses pembahasan RUU.

Dia pun mengatakan bahwa Komisi III DPR RI juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara langsung melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). DPR memandag partisipasi publik penting agar proses pembentukan RUU Perampasan Aset berlangsung terbuka, dapat diawasi, serta menghasilkan undang-undang yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, dia menegaskan bahwa DPR menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat secara damai, dan mengajak seluruh pihak menjaga keamanan serta ketertiban bersama.

95 Persen Direksi...

Sambungan dari Halaman 1

formasi total manajemen di jajaran BUMD. Dia juga menyebut bahwa proses seleksi dan penyisiran terhadap nama-nama calon pengurus hingga saat ini masih berlangsung intensif.

“Laporan Pak Sekda dengan Pak Karo Ekbang, nah tahapan-tahapannya yang lulus sekian, yang tidak lulus sekian. Sekarang lagi masih disisir, begitu,” ungkap Dimyati, Kamis (27/8).

“Kayaknya 95 persen baru ya, kayaknya ya,” tambahna.

Terkait kekhawatiran publik mengenai munculnya kembali sejumlah nama dari jajaran manajemen lama yang lolos hingga seleksi tiga besar, termasuk di internal salah satu BUMD yang kerap jadi sorotan publik yakni PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Dimyati menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penyegaran. “Kalau menurut saya nanti yang baru-baru ya, banyak yang baru ya. Tapi kita lihat nanti, yang lama bagaimana, tapi kita ingin mereformasi organisasi yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengurus lama yang tidak terpilih kembali di kursi direksi tetap berpeluang ditempatkan pada posisi lain, selama rekam jejak pengurus lama bersih tanpa rekam jejak kriminal.

“Jadi kalau misalnya yang bersangkutan nggak masuk sebagai direksi, maka dia pada positioning di tempat yang sama. Tapi intinya, yang penting jangan tersangkut masalah hukum,” tambahna.

Sementara dikonfirmasi terpisah mengenai tahapan seleksi direksi BUMD, Sekda Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengungkapkan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) telah usai digelar pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2026 lalu. Meski demikian, pihaknya mengaku masih menunggu laporan resmi

Vox Populi...

Sambungan dari Halaman 1

sudut warung kopi yang pekat, hingga di balik pendar cahaya layar gawai yang tak pernah redup, riuh suara masyarakat memantulkan kebingungan yang beragam. Apakah realitas yang kita konsumsi hari ini benar-benar nyata, atau sekadar ilusi buatan yang sengaja dirancang untuk meninabobokan nalar.

Dulu kalau orang tua bilang hujan, ya kita siapkan payung. Sekarang, ada yang bilang hujan badai, tapi yang lain bilang matahari sedang terik-teriknya. Hitam bisa jadi putih kalau yang bicara orang berkuasa atau punya harta. Kita yang di bawah ini cuma bisa diam, meski hati kecil menjerit karena tahu ada yang sangat ganjil.

Informasi hari ini ibarat makanan cepat saji. Banyak penyedap rasa, kemasannya hiperbolis, tapi beracun bagi otak. Fakta dipotong-potong, konteksnya sengaja dihilangkan, lalu dirangkai ulang hanya untuk menggiring opini publik.

Kita dipaksa menelan sebuah narasi secara bulat-bulat tanpa pernah diberi ruang untuk mengunyah dan memvalidasi kebe-

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan RUU Perampasan Aset harus membangun satu sistem pemulihan aset nasional dalam sistem peradilan pidana terpadu. Menurut dia, RUU Perampasan Aset jangan sampai menciptakan rezim baru yang tumpang tindih dengan KUHP dan KUHPA.

“Kewenangan setiap institusi dari *tracing* hingga pengembalian aset harus tegas, transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rieke dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Politisi bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan itu mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan oleh Pimpinan DPR RI tanggal 15 Desember 2026. Namun dia mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak boleh sekadar memperkuat kewenangan negara untuk merampas. Mengingat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, perampasan aset harus tunduk pada kepastian hukum, *due process of law*, kontrol pengadilan, perlindungan HAM, dan pencegahan *abuse of power*.

Dia menyebut, RUU ini harus menjadi bagian integral *Integrated Criminal Justice* System, harmonis dengan UU Nomor 1 Tahun 2023

terkait penilaian akhir para peserta. “UKK dilaksanakan tanggal 8 sampai 9. Namun, saya belum menerima laporan pastinya kapan tim penilai dari Untirta menyelesaikan rekapitulasi nilai para peserta,” ujar Deden.

Diberitakan sebelumnya, Deden Apriandhi yang juga mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk memastikan terpilihnya figur yang memiliki kompetensi dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah. Deden berharap jajaran direksi dan komisaris yang terpilih nantinya mampu memperkuat kinerja seluruh BUMD, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah sekaligus menjadi penopang berbagai program strategis Pemerintah Provinsi Banten.

Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Deden juga menegaskan, BUMD juga diharapkan mampu memperbaiki kinerja usaha dan memberikan dividen yang lebih optimal bagi pendapatan daerah. “BUMD memang didirikan untuk membantu program-program Pemerintah Provinsi Banten. Karena itu, seleksi direksi dan komisaris dilakukan agar ke depan kinerja BUMD bisa semakin baik,” kata Deden, Kamis (6/8).

Menurutnya, tahapan seleksi masih berlangsung dan dalam waktu dekat para peserta akan mengikuti agenda lanjutan berupa uji kelayakan dan Keputusan (UKK).

Deden memperkirakan seluruh proses seleksi jajaran pimpinan BUMD ini dapat rampung dalam beberapa pekan ke depan. Sehingga, penetapan direksi dan komisaris baru ditargetkan dilakukan pada awal September 2026.

“Prosesnya masih berjalan. Kalau tidak salah akhir pekan ini ada tahapan berikutnya. Tahapannya memang cukup panjang. Mudah-mudahan awal September sudah bisa ditetapkan. Tinggal menyelesaikan tahapan yang masih berjalan,” tegasnya.(MPD/ENK)

narannya.

Disisi lain, kini, fakta itu tidak lebih dari sekadar barang dagangan. Siapa yang punya modal besar untuk membayar pendengung, dia yang monopolopoli kebenaran. Yang membuat batin ini hampa bukan karena kita bodoh, tapi karena kita sadar sepenuhnya sedang dibohongi, namun sistem membuat kita lumpuh tak bisa melawan.

Beberapa suara dari jalanan ini menyumbangkan satu benang merah yang sama. Kebenaran perlahan kehilangan tajinya, mati lemas terkubur di bawah dominasi kepentingan, sensasi, dan manipulasi massa. Jiwa dan raga terasa hampa bukan karena ketiadaan arah, melainkan karena kompas kewarasan masyarakat telah dirusak dari dalam.

Fakta yang bias telah merampas kejernihan nurani manusia. Kita diibiarkan berjalan tertatih di tengah kabut kepalsuan, terus meraba mencari setitik cahaya kejujuran yang kian langka, seraya berharap esok hari angin yang berhembus kembali membawa kesenangan yang hakiki, bukan sekadar orkestrasi kebohongan yang disamarkan.*

tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHPA.

“Sistem *asset recovery* harus utuh dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pembuktian, perampasan, pengelolaan, pelepasan hingga pengembalian aset,

Pengamanan Banten...

Sambungan dari Halaman 1

pelajar, baik itu anak-anak SMP maupun SMA, yang ikut aksi,” katanya, Kamis (27/8).

Ia mengatakan untuk pola penyekatan dan pengamanan terhadap pergerakan massa aksi dipetakan di sejumlah titik krusial yang disinyalir menjadi jalur mobilitas, khususnya para remaja dan pelajar. Fokus penyekatan dan pemantauan ketat dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti di jalur perbatasan Gumarang (antara Tangerang dan Curug), akses Tol Metro, serta pintu Tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Kedaton hingga jalur arteri di Binuang.

Kemudian, pengawasan juga dilakukan di Stasiun Daru, Stasiun Tiga Raksa, dan Stasiun Cikoya. Selanjutnya, penempatan personel gabungan di berbagai objek vital serta kawasan terminal guna mencegah aksi mobilitas massa menuju Jakarta.

“Untuk memaksimalkan pengamanan, Polresta Tangerang tidak bekerja sendiri. Sebanyak 200 personel kepolisian didukung oleh unsur TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP untuk melaksanakan patroli skala besar,” kata Raden.

Meskipun pengamanan diperketat, pihak kepolisian tetap mengedepankan tindakan persuasif melalui imbauan kepada para remaja agar tidak ikut-ikutan berangkat ke Jakarta.

Dalam hal ini, Raden diharapkan aksi yang berlangsung di Gedung DPR RI dapat berjalan lancar, aman serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan damai.

“Terkait durasi pengetatan, pihak kepolisian akan melihat perkembangan situasi di lapangan. Untuk tahap awal, pola pengamanan dan penyekatan disiapkan hingga hari Minggu, dengan penyesuaian berkala bergantung pada dinamika situasi keamanan,” ucapnya.

Hal yang sama juga dilakukan di Stasiun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Tempat ini mendapat penjagaan ketat dari puluhan personel Kepolisian pada Kamis (27/8). Personel yang berjaga memantau setiap aktivitas calon penumpang *Commuter Line* yang hendak menuju Jakarta.

Penjagaan itu dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di depan gedung DPR RI.

Achmad Chatib...

Sambungan dari Halaman 1

2026 mendapat persetujuan Presiden. Sosok yang dikenal sebagai Residen pertama Banten itu telah diusulkan secara berulang selama enam tahun dan kini Pemkot Serang tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat.

Penyuluh Muda Bidang Kepahlawanan Dinsos Kota Serang, Muhammad Arif, mengatakan pengusulan Kiai Haji Tubagus Achmad Chatib bukan proses baru. Usulan tersebut telah dimulai sejak 2021 dan kembali diajukan setiap tahun karena keputusan akhir mengenai gelar Pahlawan Nasional merupakan kewenangan Presiden.

“Ini kelanjutan dari pengusulan 2021. Kemudian 2022 kita ulang lagi karena ada kendala pengesahan dari Presiden. Tahun 2023 sampai 2025 memang belum ada keputusan,” kata Arif saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/8).

Menurutnya, memasuki tahun 2026, proses administrasi dan dokumen pengusulan Achmad Chatib telah dinyatakan lengkap dan diterima kementerian. Pengusulan tersebut juga telah dilengkapi rekomendasi dari Walikota Budi Rustandi Serang dan Gubernur Banten Andra Soni. “Kalau secara

Cerita Warga...

Sambungan dari Halaman 1

Meski begitu rupanya terik matahari siang itu tak mampu menghilangkan senyum keceriaan anak-anak sepulang sekolah. Keceriaan itu tampak semakin jelas ketika mereka sampai di tepian aliran sungai Ciberang.

Mereka tampak begitu sabar menanti giliran satu per satu masuk ke dalam getek — perahu dari susunan bambu dan jeriken — yang sedari tadi begitu sabar menunggu di tepian sungai.

dengan pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban yang jelas,” katanya menerangkan.

Sementara, Massa AMPB membubarkan diri dan meninggalkan kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis siang, setelah

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak puluhan personel Kepolisian berseragam lengkap dan berpakaian sipil bersiaga di area lobby Stasiun Rangkasbitung. Tidak hanya di lobby, penjagaan juga tampak di sekitar area gerbong *Commuter Line* relasi Rangkasbitung-Tanah Abang.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan, personel Kepolisian yang disiagakan itu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR RI, Jakarta.

Dia membantah, jika penjagaan itu dimaksud untuk mencegah pemberangkatan massa aksi menuju Jakarta. Katanya, langkah itu justru diambil guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Bukan untuk melakukan penyekatan terhadap massa aksi. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat, baik yang menyampaikan aspirasi maupun pengguna jalan lainnya dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Selain Stasiun Rangkasbitung, Maruli menyampaikan, pihak Kepolisian juga turut mengamankan sejumlah titik aktifitas masyarakat lainnya seperti pasar, terminal, maupun area perkantoran lainnya. Hal itu dimaksud guna meminimalisir terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat.

“Kita mengamankan titik aktivitas masyarakat agar tidak terjadi gangguan. Polda Banten memastikan masyarakat dapat beraktifitas, baik di jalan, di pasar, terminal, maupun perkantoran,” pungkasnya.

Di Stasiun Rangkasbitung tampak pula Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Lebak, Gugun Nugraha. Kehadirannya di sana guna memastikan tidak adanya pelajar SMA dari Kabupaten Lebak yang turut serta dalam aksi 27 Agustus di Jakarta.

“Ya, ini kan menyikapi gejala sosial yang di Kota Jakarta. Kita memantau pergerakan, khawatir ada siswa kita yang ikut ke sana karena tugas siswa itu kan harus belajar,” ujarnya.

Selain memantau langsung di Stasiun Rangkasbitung, Gugun mengatakan, pihaknya juga meminta kepada para guru untuk senantiasa memastikan kehadiran

data sudah absah. Enggak ada yang salah. Kami sudah mengusulkan dan sudah final, sudah diterima di kementerian,” ujarnya.

Arif menegaskan, belum ditemapkannya Achmad Chatib sebagai Pahlawan Nasional bukan berarti usulan tersebut ditolak. Persoalannya lebih kepada terbatasnya kuota gelar Pahlawan Nasional dibandingkan jumlah tokoh yang diusulkan dari berbagai daerah.

“Bukan ditolak. Jadi, kalau secara data sudah absah. Tetapi karena kuota nasional ini sedikit, sementara pengusulannya banyak dari hampir 36 provinsi, kita mungkin terselip,” jelasnya.

Meski demikian, Arif mengaku optimistis Achmad Chatib dapat memperoleh gelar tersebut pada 2026. Ia menyebut proses pengusulan saat ini telah selesai dan Pemkot Serang tinggal menunggu pengumuman pemerintah pusat yang biasanya dilakukan menjelang akhir Oktober.

“Seratus persen saya optimis. Kalau dihitung sudah lebih dari lima tahun, dan tidak ada perbaikan materi sedikit pun karena sudah absah dari awal. Kami dari awal sudah lengkap,” tegas Arif.

Arif menjelaskan, pengusulan Achmad Chatib juga telah melalui

menerima komitmen pimpinan DPR RI terkait penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Pantauan di lokasi, massa asal Pati tersebut mulai berangsur meninggalkan kawasan demonstrasi setelah Koordinator AMPB Supri-

para siswa di sekolah. Pihaknya akan menindaklanjuti para siswa apabila kepadatan tidak masuk sekolah tanpa ada kejelasan.

“Apabila kepadatan ada siswa yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, ini harus proses juga,” ucapnya.

Gugun menegaskan, langkah tersebut dilakukan dalam rangka meminimalisir potensi masalah yang terjadi akibat keterlibatan para siswa dalam aksi tersebut. Ia juga mengimbau semua pihak termasuk para siswa untuk tidak mudah terpancing provokasi oleh informasi yang kebenarannya masih diragukan.

“Ini jangan sampai terpengaruh, terprovokasi oleh informasi-informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Kombes Pol Maruli berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kondisi Banten tetap aman dan kondusif, terutama dalam setiap momentum penyampaian pendapat di muka umum.

“Mari bersama-sama menjaga Banten tetap aman dan kondusif. Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik, damai, dan bertanggung jawab,” paparnya.

Terkait adanya isu penyekatan bagi massa aksi yang hendak ke Jakarta, Maruli menegaskan penerahan personel kepolisian di lapangan dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ditujukan untuk memberikan pelayanan dan memastikan aksi berjalan aman serta tertib. Kepolisian memastikan personel yang disiagakan bukan untuk melakukan penyekatan terhadap massa aksi.

“Seluruh personel yang disiagakan di lapangan hari ini, bertugas untuk pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, bukan untuk melakukan penyekatan terhadap massa aksi,” tegasnya.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Hal itu tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi, tetapi juga pengguna jalan serta masyarakat lainnya yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Polda Banten mengedepankan pengamanan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas penyampaian aspirasi dapat tetap berjalan tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Kepolisian juga mengajak se-

proses panjang di tingkat daerah. Nama tersebut dibahas oleh Tim Penilai dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), melibatkan unsur veteran, pejuang, akademisi, serta tokoh terkait.

Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui seminar dan bedah buku, baik di tingkat Kota Serang maupun Provinsi Banten. Proses tersebut dilakukan untuk menguji rekam jejak dan kontribusi Achmad Chatib sebelum namanya diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

“Bukan hasil merenung, tapi hasil dari pertemuan di TP2GD. Dilanjutkan dengan seminar bedah buku, baik tingkat kota maupun tingkat provinsi,” katanya.

Ia menyebut terdapat sejumlah alasan yang memperkuat pengusulan Achmad Chatib. Selain pernah menjadi Residen pertama Banten, Achmad Chatib juga tercatat pernah terlibat dalam pemerintahan tingkat nasional, termasuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Selain itu, kiprahnya dalam bidang pendidikan dinilai memiliki jangkauan luas hingga ke luar Banten. Namanya juga telah digunakan sebagai nama jalan dan para siswa di sekolah. Pihaknya akan menindaklanjuti para siswa apabila kepadatan tidak masuk sekolah tanpa ada kejelasan.

“Apabila kepadatan ada siswa yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, ini harus proses juga,” ucapnya.

Gugun menegaskan, langkah tersebut dilakukan dalam rangka meminimalisir potensi masalah yang terjadi akibat keterlibatan para siswa dalam aksi tersebut. Ia juga mengimbau semua pihak termasuk para siswa untuk tidak mudah terpancing provokasi oleh informasi yang kebenarannya masih diragukan.

yono alias Botok menyampaikan hasil audiensi dengan perwakilan DPR RI kepada peserta aksi.

Setelah mendengarkan isi komitmen tersebut, massa AMPB kemudian berangsur membubarkan diri.=(ANT/ENK)

luruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.

“Langkah ini diambil guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat, baik yang menyampaikan aspirasi maupun pengguna jalan lainnya, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” tandasnya.

Pada bagian lain, Polres Cilegon bersama komunitas *driver online* menggelar doa bersama dan bakti sosial untuk mengenang almarhum Affan di Aula Wicaksana Laghawa Polres Cilegon, Kamis (27/8). Kegiatan tersebut diikuti jajaran kepolisian, perwakilan MUI Kota Cilegon, PDOC, MRC, serta driver online dari Gojek, Grab, Maxim dan Shopee Food.

Kapolres Cilegon AKBP M. Probandono Bobby Danuardi mengatakan komunitas driver online memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.

“Selain menjadi momentum doa bersama untuk mengenang almarhum Affan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk bertatap muka dan bersilaturahmi secara langsung dengan komunitas ojek online Kota Cilegon,” ujar Bobby.

Ia menegaskan Polres Cilegon akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan komunitas driver online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Ketua PDOC Mohammad Rosyid mengapresiasi kegiatan yang difasilitasi Polres Cilegon. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik antara komunitas driver online dan kepolisian.

“Bagi kami, kegiatan ini bukan hanya tentang doa bersama dan bakti sosial, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan kepolisian. Kami berharap sinergi seperti ini terus berjalan karena driver online juga bagian dari masyarakat yang ikut menjaga keamanan di Kota Cilegon,” pungkas Rosyid.

Kegiatan yang melibatkan ojol juga digelar Korlantas Polri Bersama Asosiasi Ojol Nusantara di Serpong, Kota Tangerang Selatan. kegiatan itu bertema Gebyar Keselamatan Berlalu Lintas yang digelar Korlantas Polri bersama para pemangku kepentingan dan komunitas ojol di Pusdiklantas Polri.(ANTI/CR-03/TQS/MYU/ENK)

fasilitas tertentu sebagai bentuk pengakuan terhadap jasa dan perjuangannya. “Pengkakuan itu yang tertinggi salah satunya adalah uang Republik Indonesia Daerah Banten. Itu salah satu prestasi beliau,” tutur Arif.

Tak hanya Achmad Chatib, Pemkot Serang juga tengah mempersiapkan sejumlah nama lain untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. Di antaranya Samun Bakri, yang disebut sebagai mantan wakil Residen Achmad Chatib, serta Kiai Haji Tubagus Abdul Fatah Hasan.

Namun, Arif mengatakan dua nama tersebut masih membutuhkan proses kajian dan verifikasi yang cukup panjang. Pemkot Serang perlu menyusun profil, melakukan verifikasi data, membentuk tim pengkaji, hingga melaksanakan tahapan pengusulan.

“Untuk dua nama terakhir ini perlu adanya penyusunan proyek. Artinya kita perlu verifikasi data, kemudian pembentukan tim penilai pengkaji gelar daerah tingkat kota,” pungkasnya.

Okeh sebabnya, pengusulan Samun Bakri dan Kiai Haji Tubagus Abdul Fatah Hasan diperkirakan baru dapat dilakukan mulai 2027 dan berpeluang diajukan ke tingkat nasional pada 2028.(CR02/ENK)

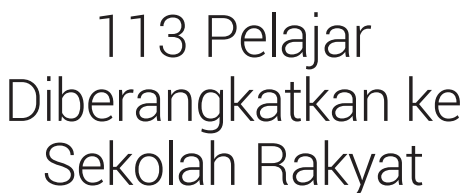
sepeserpun. “Hitung-hitung amal lah,” ujar Aan, salah seorang warga yang membuka jasa penyedia penyeberangan.

Meskipun menyeberangi sungai Ciberang lebih cepat dan menyenangkan namun di lubuk hati terdalam, warga Somang tetap ingin memiliki akses jalan yang memadai. Sebab bagaimanapun faktor keselamatan adalah yang nomor satu. “Udah lama rusak nggak diperbaiki. Pengennya sih jalannya bagus biar nggak nyeberang lagi,” ucap Ani, salah seorang ibu rumah tangga.(ENK)

kosong pada gelaran forum simposium semata. Aparatur wilayah kini sepenuhnya diwajibkan memasukkan kerangka mitigasi tersebut pada rincian perencanaan anggaran.

Konektivitas lintas wilayah ini dinilai amat krusial. Sistem kita wajib menuju format aglomerasi.

“Kemendagri berusaha membangun terobosan dengan fokus pada aglomerasi-aglomerasi,” tutur Bima. (ANT/AZM)



BPJS Ketenagakerjaan Dampingi Korban Kecelakaan Kerja Ikut Program RTW

“Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh pengusaha/perusahaan bahkan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan pekerja/ diri sendiri agar mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini akan membantu kita ketika mengalami resiko-kita sosial,” ungkapnva. (MPD/AZM)

Darurat Partisipasi Pendidikan Nonformal Anak Bangsa

“Sejumlah kendala itu harus menjadi kepedulian semua pihak,” tegas Lestari. (ANT/AZM)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UUD No. 1 tahun 1998, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tangerang Merseka akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui internet dengan penjaminan Kantor Pelayanan Kelengkapan Negeri dan Lelang (KPKNL) Tangerang untuk kedua sengketa jaminan di bawah sebagai berikut:

1. Pelepy Aendri

- Dua bidang tanah seluas total perkiraan dari :
 - a. Sesebuah tanah yang terletak di antara dan segala sesuatu yang melekat dan berakutanya terletak di Blok E No. 5/2, Desa/Kelurahan/Tanjari, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Tanggaraja, Provinsi Banten, sesuai SHGB No. 0205/2 Tanah terestak atas nama Pelepy Aendri,
 - b. Sesebuah tanah seluas 17 m² bertukar bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berakutanya terletak di Blok E No. 5/2, Desa/Kelurahan/Tanjari, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Tanggaraja, Provinsi Banten, sesuai SHGB No. 0045/4 Tanah terestak atas nama Pelepy Aendri.

Sesetempat Obekur Perumahan Terestak, Blok E No. 5/2, Desa/Kelurahan/Tanjari, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Tanggaraja, Provinsi Proviinsi Banten (Nilai Limit: Rp. 150.000.000,- Uang Jaminan Rp. 75.000.000,-).

Lelang dilaksanakan pada :

- Tgl. Selasa, 15 September 2020
- Hari / Tanggal : Selasa tanggal pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Waktu Penawaran : Sejak त्यang pada aplikasi lelang Pukul. 09.00 Waktu Server e-Auction (WIB)
- Batas Akhir Penawaran : 15 September 2020, Pukul. 09.00 Waktu Server e-Auction (WIB)
- Alamat Domain Lelang : <https://www.lelang.go.id>
- Tempat : Kantor Pelayanan Kelengkapan Negara (T.M.P.) Tangerang / Lelang Tangerang I, Jalan Taman Makam Pahlawan (Ng. R) Ng. Taruna, Kota Tangerang
- Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat dan Ketentuan Lelang :

- LeLang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang terbuka melalui internet (Open Bidding) melalui email yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Pengunjung" pada domain tersebut.
- Pemilik lelang wajib menyerahkan dokumen persyaratan lelang kepada pihak KPKNL Tangerang atau harus sudah efektif dilemas oleh KPKNL Tangerang / selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorakan ke nomor "Virtual Account (VA)" masing-masing peserta lelang. Nomor "Virtual Account (VA)" akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan diterbitkannya identitas dipanggil bayar.
- Pemilik lelang dapat melihat bahwa orang yang dialfikan pada awal akses lelang sudah mengumumi n terbit sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemilik lelang wajib membayar (pokok lelang ditambah besa lelang pembesl sebesar 2%) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi, sebab uang jaminan akan disetorakan ke Kas Negara sebagai penjaminan lain-lain.
- Untuk Pengetahuan Surat-Surat anggaran lelang (senafit, dll), diharapkan sudah melunasl kewajiban PPN 1% dan Pungutan lainnya.
- Pengembal BPHB atas perolehan tanah diatas bawasan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Kekuasaan Angkara Penerimaan dan Pembelian Barang Milik Negara Republik Indonesia.
- Karena surat dan lain lah, pihak Penjual dan Pejabat Lelang dapat melakukan pembelian/penjualan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berperkembangan/pemilik lelang dapat melakukan tindakan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, Sekali lelang ditinjau KPKNL Tangerang I.
- Obyek lelang diatas land kondisi apa adanya (as is) dengan segala konsekuensi biaya-biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap mengetahui/memahami kondisi obyek lelang sehingga apabila ada soal hasil terdapat tuntutan, pertambalan/pertimbangan pelaksanaan lelang mengenai obyek lelang, pihak pembeli lelang bertanggung jawab dan pemisal lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang, PT Bank BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tangerang Merseka, Kanwil DJKN, Kantor Pusat DJKN.
- Informasi lebih lanjut tentang asnd dan panyataan lelang dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tangerang Merseka, (Telp) 021 5529 231, 5528 234, 08888989898 atau KPKNL Tangerang (Telp) 021 5279 422.

Tangerang, 28 Agustus 2026
Ttd.
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Tangerang Merseka



KPKNL Tangerang I

?Wisatawan tersebut datang dengan rombongan baik keluarga, pasangan, maupun komunitas masyarakat.

Kusni, pengunjung saba budaya warga Jakarta, mengatakan pihaknya bersama rombongan berkunjung ke Badui dan menginap malam Rabu serta kembali ke Jakarta pada Kamis (27/8).

Menurutnya, kawasan Badui sangat menyenangkan untuk melepaskan kepenngapan di Jakarta, dimana panorama alam Badui masih asli dan benar-benar memberikan

Pengunjung wisatawan atau saba budaya memadati permukiman Badui di pedalaman Kabupaten Lebak.

Kondisi topografi pemukiman Badui yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, kata dia, menjadi tantangan tersendiri.

"Kami bersama rombongan berjalan kaki menebus hutan dan jalan setapak menuju pemukiman Badui di Kampung Kadu Gajah sangat melelahkan, meski sepanjang tiga kilometer, namun setelah makan du-

Sementara itu Sandra (17), warga Tangerang, bersama rombongan komunitas mengunjungi saba budaya Badui untuk melihat kehidupan masyarakat adat, juga

membeli durian dengan harga Rp30 ribu sampai Rp100 ribu per butir. Ia mengatakan kehidupan masyarakat Badui luar biasa dengan kesederhanaan mampu menjaga alam, sehingga mem-

berikan pelajaran bagi masyarakat untuk mencintai alam agar tidak rusak.

"Kami menginap ke pemukiman Badui dan pulang Kamis pagi," kata Sandra. (ANT/RUS)

Bulog Lebak Pastikan Stok Beras Aman Hadapi Kekeringan

Perum Bulog menyalurkan beras kepada masyarakat penerima bantuan pangan (PBP) sebanyak 220.428 kepala keluarga.

"Kami memastikan persediaan beras surplus dan aman menghadapi kekeringan," kata Syaukani.

Apalagi, menurut dia, Perum Bulog Cabang Lebak hingga kini masih melakukan penyerapan ga-

Penyerapan gabah tersebut dipastikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani karena dibeli sesuai harga pembelian pemerintah Rp6.500 per kilogram.

"Kami berkomitmen untuk menyerap gabah petani guna membantu ekonomi juga untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP)," katanya.(ANT/RUS)

Ekonom Nilai Pasar Domestik Jadi Daya Tarik Investasi Petrokimia

dukung ketersediaan bahan mentah, infrastruktur, tenaga kerja yang mumpuni, kemudian pasokan

Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri yang besar sebenarnya menjadi peluang

"Strategi substitusi impornya itu harus bisa berjalan smooth tanpa mengganggu rantai pasok yang efi-

"Kalau biaya produksinya meningkat terus harga jualnya ditingkatkan, risikonya takut eng-gak laku atau masyarakat beralih. Cara lainnya mereka mengalki de-ngan volume makanannya atau isinya. Itu kita rasakan sebagai kon-sekuensi akibat kenaikan biaya pro-duksi, salah satunya plastik," sebut Heri.(ANT/RUS)

Seiring Permintaan Tinggi Janji Danantara Perluas Investasi Pusat Data

any strategic partnership must include tech./knowledge transfer for local talent development

- Sovereignty and domestic focused digital strategy
- Safeguard critical digital infra.¹

Inglori, Reducing technology import

IASI: 5 Mei Visma Danantara Indonesia

Chief Technology Officer (CTO) Danantara Sigit Puji Santosa memimpin Rapat Koordinasi Transformasi Digital BUMN yang dihadiri oleh sekitar 60 perusahaan holding utama BUMN di Jakarta.

Danantara, kata dia, siap mengambil bagian dalam pengembangan infrastruktur tersebut, termasuk menyiapkan kebutuhan teknologi dan komponen pen-

Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) juga dilibatkan dalam pengembangan tersebut.

Ia menambahkan kebutuhan terhadap AI chip saat ini juga mengalami peningkatan tajam secara global, dengan waktu tunggu untuk memperoleh chip tersebut di sejumlah negara dapat mencapai enam hingga sembilan bulan.

Namun demikian, ia mengatakan pengembangan infrastruktur digital masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan daya serta kompleksitas proses dan regulasi.

"Memang tantangannya cukup besar, tapi juga peluangnya juga cukup besar," ucap Sigit.(ANT/RUS)

[illegible]



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

Ormas Harus Hadirkan Solusi dan Manfaat Bagi Masyarakat

TANGERANG, BANPOS - Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak cukup hanya eksis di tengah masyarakat, tapi harus mampu menjadi kekuatan sosial yang aktif, produktif, dan menghadirkan solusi serta manfaat nyata bagi masyarakat

Menurutnya, ormas memiliki peran strategis untuk menggerakkan partisipasi dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Tangerang. Bahkan ormas merupakan kekuatan sosial yang dekat dengan masyarakat.

"Ormas juga memiliki posisi strategis sebagai kekuatan sosial yang dekat dengan masyarakat, mampu menggerakkan partisipasi, serta menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Tangerang," kata Wali Kota Sachrudin saat membuka Jambore Ormas se-Kota Tangerang Tahun 2026 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata, Sawangan-Depok, Rabu (27/8).

Mengusung tema "Ormas Bersatu, Bersinergi, dan Berkarya untuk Kota Tangerang", Sachrudin berharap jambore tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi menjadi ruang memperkuat komunikasi, bertukar gagasan, mem-

perluas jejaring, dan melahirkan kolaborasi nyata.

"Mari kita buktikan bahwa ormas di Kota Tangerang bukan hanya mampu bersatu dan bersinergi, tetapi juga produktif, inovatif, dan konsisten menghadirkan karya nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ucapnya.

Ia menambahkan ukuran keberhasilan ormas bukan semata dari eksistensi, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diberikan.

"Organisasi terbaik adalah organisasi yang kehadirannya membawa solusi, memberikan manfaat, dan dinantikan oleh masyarakat," kata Sachrudin.

Jambore Ormas 2026 diikuti 49 ormas, berlangsung pada 26–28 Agustus 2026. Peserta juga mendapat penguatan kapasitas dari sejumlah narasumber, antara lain TNI AD, Lemhannas, pengamat politik, dan DPRD Kota Tangerang melalui perwakilan dari Komisi I.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang Wawan Fauzi menambahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendorong ormas menjadi mitra strategis dalam menjaga persatuan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah.

Ia menjelaskan Jambore ini tidak

hanya menjadi ruang silaturahmi. Kegiatan juga diarahkan untuk membangun kolaborasi aktif antara pemerintah dan ormas sebagai mitra dalam pembangunan.

Selain itu forum tersebut menjadi sarana memperkuat solidaritas antarkelompok, membuka komunikasi untuk mencegah potensi konflik sosial, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan ormas.

"Berbagai narasumber turut dihadirkan untuk memberikan wawasan kepada peserta, mulai dari unsur DPRD Kota Tangerang, Kodim, Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila (YPLP), hingga pengamat politik," kata Wawan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Tangerang berharap keberadaan ormas semakin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ormas diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga mampu menjadi bagian dari upaya menjaga suasana kondusif dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat.

"Ke depan, ormas diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial di lingkungan masing-masing," ucap Wawan.(ANT/RUS)



Wali Kota Sachrudin saat membuka Jambore Ormas se-Kota Tangerang Tahun 2026 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata, Sawangan-Depok.

Kepsek Diminta Perketat Pengawasan Aktivitas Pelajar

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, mengeluarkan surat (SE) imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah (kepsek) pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pelajar.

Langkah ini, dilakukan sebagai mengantisipasi adanya pelajar di daerah itu terlibat dalam aksi untuk rasa pada Kamis (27/8) di Kawasan Senayan DPR RI, Jakarta.

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah di Tangerang, Kamis (27/8) mengatakan bahwa proses pengawasan dilakukan langsung oleh jajaran tenaga pendidik hingga pihak kepolisian.

"Jadi untuk sementara kegiatan sekolah masih masuk. Tapi aparat kepolisian akan sweeping pelajar untuk mengantisipasi ikut demo ke Jakarta," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna menambahkan, dalam surat edaran yang ditunjukkan kepada para Kepsek ini menekankan pentingnya peran aktif pihak sekolah dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan secara optimal.

Di mana, lanjut dia, poin penting yang disoroti adalah pengawasan ketat terhadap tingkat kehadiran siswa. Guru piket dan wali kelas diinstruksikan untuk memantau kehadiran peserta didik secara berkala, termasuk melakukan pengecekan di setiap pergantian jam pelajaran.

"Pengawasan juga diperluas hingga jam sekolah berakhir. Pihak sekolah diminta memastikan agar para siswa langsung pulang ke rumah tepat waktu dan tidak berkeliaran di luar lingkungan sekolah tanpa keterangan yang jelas setelah jam pelajaran selesai," ungkapnya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan siswa yang mangkir tanpa keterangan atau berada di luar sekolah pada jam pelajaran maupun pasca-jam sekolah, pihaknya mengimbau untuk segera menindaklanjuti secara cepat serta berkoordinasi langsung dengan orang tua atau wali murid.

"Melalui edaran ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berharap seluruh kepala sekolah da-

pat meneruskan instruksi tersebut kepada jajaran guru serta tenaga kependidikan di satuan pendidikan masing-masing, demi menciptakan lingkungan belajar yang disiplin, aman, dan kondusif," kata dia.

Sebelumnya, Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten menerbitkan sedikitnya 200 lebih personel gabungan untuk melakukan patroli dan penyekatan pergerakan terhadap massa aksi yang akan menuju Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 melalui Gerbang Tol hingga Stasiun Kereta.

"Kami mempersiapkan untuk mengantisipasi adanya masa yang akan ke Jakarta, khusus wilayah Tangerang. Tentunya kita mengantisipasi adanya para pelajar, baik itu anak-anak SMP maupun SMA, yang ikut aksi," kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Tangerang, Kopol Raden Mochammad Sofian.

Untuk pola penyekatan dan pengamanan terhadap pergerakan massa aksi dipetakan di sejumlah titik krusial yang disinyalir menjadi jalur mobilitas, khususnya para remaja dan pelajar.

Di mana, fokus penyekatan dan pemantauan ketat dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti di jalur perbatasan Gumarang (antara Tangerang dan Curug), akses Tol Metro, serta pintu Tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Kedaton, hingga jalur arteri di Binuang.

Kemudian, pengawasan juga dilakukan di Stasiun Daru, Stasiun Tiga Raksa, dan Stasiun Cikoya. Selanjutnya, penempatan personel gabungan di berbagai objek vital serta kawasan terminal guna mencegah aksi mobilitas massa menuju Jakarta.

"Untuk memaksimalkan pengamanan, Polresta Tangerang tidak bekerja sendiri. Sebanyak 200 personel kepolisian didukung oleh unsur TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP untuk melaksanakan patroli skala besar," kata dia.(ANT/RUS)

Pemkot Keluarkan SE Jemput Anak Sekolah Pada 27–28 Agustus

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengimbau pendampingan dan penjemputan peserta didik khusus tanggal 27–28 Agustus 2026, terkait adanya informasi rencana aksi penyampaian pendapatan di Jakarta dan sekitarnya.

SE Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor B/526/400.3.1/VIII/2026 tersebut ditujukan kepada kepala TK/PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota

Tangerang.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang Wahyudi Iskandar di Tangerang, Rabu, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, peserta didik khususnya saat perjalanan pulang sekolah.

Dalam surat yang ditetapkan pada 26 Agustus 2026 itu Disdik Kota Tangerang juga meminta seluruh siswa jenjang SD dan SMP dijemput langsung oleh orang tua/wali murid atau pihak keluarga yang telah dipercaya

saat jam kepulangan sekolah.

Pihaknya juga mengimbau agar siswa tidak diperbolehkan pulang sendiri, menggunakan transportasi umum tanpa pendampingan, maupun berkumpul di luar lingkungan sekolah.

Selain itu apabila orang tua atau wali murid mengalami keterlambatan dalam menjemput akibat pengalihan lalu lintas maupun kemacetan, mereka diminta segera menginformasikan kondisi tersebut kepada guru kelas atau wali kelas masing-masing.

Orang tua/wali memastikan anak-anak langsung menuju ke rumah setelah dijemput dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak selama aksi berlangsung.

"Dinas Pendidikan Kota Tangerang berharap seluruh pihak, terutama sekolah dan orang tua/wali murid, dapat bekerja sama menjalankan imbauan tersebut demi memastikan peserta didik tetap aman selama periode pelaksanaan aksi demonstrasi," ujar Wahyudi Iskandar.(ANT/RUS)

Yang Pertama Hadir di Provinsi Banten

Rumah Sehat Sahabat Paru Pertama Diresmikan

TANGERANG, BANPOS - Pemkot

Tangerang bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang meresmikan Rumah Sehat Baznas (RSB) Sahabat Paru sebagai tempat pendampingan sementara bagi pasien tuberkulosis (TB), khususnya pasien resisten obat (RO) dan pertama di Provinsi Banten.

Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Kamis, mengatakan kehadiran fasilitas pertama di Banten ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama bahwa penanganan TB tidak cukup hanya melalui pengobatan medis. Pasien juga membutuhkan dukungan keluarga, pemenuhan gizi, lingkungan yang mendukung, hingga pendampingan selama menjalani pengobatan.

"TB bukan hanya persoalan medis, mereka membutuhkan perhatian dan dukungan agar bisa menjalani pengobatan sampai tuntas dan tidak menularkan kepada orang lain," ujar Sachrudin usai peresmian di Perumahan Bina Marga, Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (27/8).

Menurutnya, penanggulangan TB membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan Baznas, tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat eliminasi TB.

"Persoalan kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Begitu pula zakat, infak, dan sedekah bukan hanya tentang ibadah secara personal, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan ma-

sarakat," lanjutnya.

Menurut Sachrudin, RSB Sahabat Paru menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat dihadirkan dalam bentuk manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi persoalan kesehatan.

Ia berharap, keberadaan RSB Sahabat Paru tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan, tetapi juga menjadi ruang pendampingan, penguatan, dan pemberian harapan bagi pasien TB serta keluarganya.

Wakil Ketua II Baznas Kota Tangerang Danni Budianto mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari pengembangan program di bidang kesehatan. Pembiayaan program ditanggung Baznas, sedangkan proses seleksi penerima manfaat dan

pendampingan pengobatan dilakukan bersama Dinas Kesehatan.

Menurut Danni, program ini dirancang tidak hanya untuk membantu pasien melewati masa pengobatan, tetapi juga mendorong penerima manfaat agar dapat kembali sehat dan mandiri. "Ini kan pemberdayaan. Ini perlu waktu. Harapannya bisa sembuh, kembali ke masyarakat, kemudian kita berikan intervensi bantuan modal usaha ekonominya sehingga mereka bisa berubah menjadi sehat dan mandiri," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni menjelaskan, fasilitas tersebut diperuntukkan bagi pasien TB resisten obat yang membutuhkan pendampingan dalam

menjalani pengobatan.

Rumah sehat tersebut menyediakan tiga kamar dengan kapasitas enam pasien. Setiap pasien akan menjalani pendampingan selama 14 hari sekaligus mendapatkan obat sesuai penanganan medis.

Menurutnya, pendampingan selama 14 hari juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Sebab, pengobatan TB membutuhkan waktu panjang dan pasien perlu konsisten mengonsumsi obat sesuai anjuran tenaga kesehatan.

"Harapan kami adalah pada pasien dengan TB ini bisa kita putus rantai penularannya, baik kepada keluarga maupun masyarakat di sekitar," katanya.(ANT/RUS)



Rumah Sehat Baznas (RSB) Sahabat Paru di Perumahan Bina Marga, Cikokol, Kota Tangerang, diresmikan dan menjadi tempat pendampingan sementara bagi pasien TBC, khususnya pasien resisten obat (RO) dan pertama di Provinsi Banten.